

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG R.I
TAHUN 2018**



**BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
By Pass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat 10510
Telp. 021-2907 9177 Fax. 021-2907 9274

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018, laporan Kinerja ini dibuat sebagai hasil pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018.

Tujuan dilaksanakannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 adalah untuk memberikan gambaran dan informasi secara keseluruhan tentang keberhasilan dan capaian Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan selama tahun 2018 dan memberikan dorongan untuk melakukan perbaikan-perbaikan ditahun mendatang.

Akhirnya, laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan menjadi bahan acuan dan media evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik sesuai dengan Visi dan Misi Badan Pengawasan. Harapan kami adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam usaha perbaikan sistem pengawasan dan peningkatan implementasi pengawasan sehingga dapat terwujud budaya pengawasan di lingkungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Jakarta, 18 Februari 2019

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI



NUSROHO SETIADJI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengawasan Mahkamah Agung tahun 2018 dimaksudkan sebagai media informasi / laporan tentang capaian keberhasilan Badan Pengawasan Mahkamah Agung selama tahun 2018 dan yang sekaligus sebagai wujud Akuntabilitas.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung merupakan pengawasan internal yang khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas pengawasan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Sebagai Aparat Pengawas Badan Pengawasan dituntut untuk melaksanakan tugas secara profesional sehingga dapat mewujudkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

Pada tahun 2018, Badan Pengawasan melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Pembinaan dan Pengelolaan SDM

Pada tahun 2018, jumlah sumber daya manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berjumlah 162 orang, yang terdiri dari tenaga teknis yudisial 55 orang, tenaga non teknis yudisial 90 orang, dan tenaga Honorer 17 orang dengan komposisi jabatan sebagai Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural, Staf dan Honorer dengan rincian sebagai berikut :

A. Pejabat Struktural :

- Pejabat Eselon I : 1 orang
- Pejabat Eselon II : 5 orang (Sekretaris dan 4 Inspektur wilayah)
- Pejabat Eselon III : 4 orang
- Pejabat Eselon IV : 16 orang

B. Pejabat Fungsional

- Hakim Tinggi : 38 orang
- Hakim Yustisial : 17 orang
- Auditor : 12 orang
- Auditor Kepegawaian : 8 orang
- Analis Kepegawaian : 1 orang
- Pranata Komputer : 2 orang

C. Staf : 41 orang

D. Honorer : 17 orang

2. Penanganan Pengaduan

Pada tahun 2018, Jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sejumlah 3.080 pengaduan. Untuk pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan sejumlah 2.119 pengaduan, untuk pengaduan dari instansi / stakeholder Mahkamah Agung sejumlah 523 pengaduan, Pengaduan Aplikasi Siwas sejumlah 380 pengaduan dan Pengaduan dari Satgas sejumlah 58 pengaduan.

3. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Sebagai tindaklanjut surat pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I, pada tahun 2018 Badan Pengawasan telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 163 aparat peradilan.

4. Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Jumlah hakim yang diajukan dan diputus dalam Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) pada tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) orang, kemudian menurun pada tahun 2017 sebanyak 2 (dua) orang dan pada tahun 2018 yang diajukan ke MKH sebanyak 2 (dua) orang namun oleh karena 1 (satu) orang telah mengundurkan diri sehingga yang diputuskan dalam sidang MKH hanya 1 (satu) orang.

5. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan telah melakukan kegiatannya selaku APIP yaitu diantaranya Reviu Laporan Keuangan, Reviu RKA K/L, Reviu RKBMN Online, Reviu Tender Pra DIPA dan Reviu PA PBJ, Pemeriksaan Keuangan, Audit Pengadaan Barang/Jasa, *Consulting dan Assurance*, serta *Liaison Officer (LO)*.

6. Kegiatan Pemeriksaan Reguler

• Pemeriksaan Reguler

Tahun 2018 Badan Pengawasan melakukan pemeriksaan Reguler pada 129 Satuan Kerja (Satker). Pemeriksaan Reguler pada Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 71 satker. Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 46 satker. Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 5 satker, Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 6 satker dan Pengadilan Pajak berjumlah 1 satker.

- **Reguler Pendampingan**

Tahun 2018 Badan Pengawasan melakukan pemeriksaan Reguler Pendampingan pada 23 Satuan Kerja (Satker). Pemeriksaan Reguler pada Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 12 satker. Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 10 satker dan Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 1 satker.

- **Pemeriksaan Reguler Bersama KPK dan BPKP**

Badan Pengawasan Mahkamah Agung bekerjasama dengan KPK dan BPKP untuk melakukan pemeriksaan reguler bersama pada beberapa Pengadilan yang dijadikan sampling uji petik terhadap Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tinggi Palembang, dan Pengadilan Negeri Palembang.

7. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2017 (pelaksanaan Tahun 2018) terdapat 3 Satker (4,05%) memperoleh nilai A, 49 Satker (66,21%) memperoleh nilai BB, 12 Satker (16,21%) memperoleh nilai B, dan 10 Satker (13,51%) memperoleh nilai CC. Jika dibandingkan dengan Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2016 (pelaksanaan Tahun 2017) ada kecenderungan nilai A dan nilai BB meningkat. Untuk melakukan evaluasi Laporan Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama adalah merupakan kewajiban pengadilan tingkat banding sesuai wilayah hukumnya

8. Pemeriksaan Kinerja dan Integritas

Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai pengawas Internal pada tahun 2018 telah melakukan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas yang berorientasi pada pengelolaan keuangan Negara, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 100 Satker.

Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas Pada Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 57 satker. Di Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 30 satker. Di Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 7 satker dan di Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 6 satker.

9. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

- a. Temuan pemeriksaan BPK RI sejak tahun 2005 sampai dengan semester I tahun 2018 sebanyak **488** temuan pemeriksaan dengan **986** rekomendasi. Hingga Semester I tahun 2018 sebanyak **797** rekomendasi atau sebesar **80,83%** sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan rekomendasi BPK, sebanyak 64 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut, **114** rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah dan 11 rekomendasi belum ditindaklanjuti.
- b. Total nilai temuan pemeriksaan BPK sejak tahun 2005 sampai dengan semester I tahun 2018 sebesar **Rp43.166.669.702,74** nilai rekomendasi sebesar **Rp32.952.953.713,63**. Hingga Semester I Tahun 2018 sebesar **Rp24.273.013.323,80** sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan rekomendasi atau sebesar 73,66 %, nilai yang masih dalam proses tindak lanjut sebesar Rp4.682.812.459,00 atau sebesar 14,21 % dan nilai sebesar Rp523.228.818,83 atau sebesar 1,59 % tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Total nilai aset atau penyetoran uang ke kas negara sejak tahun 2005 sampai dengan Semester I tahun 2018 sebesar **Rp26.549.410.435,12**.

Mahkamah Agung telah menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) sampai dengan semester I Tahun 2018 sebesar 80,83%, sisa yang belum ditindaklanjuti sejumlah Rp.3.473.899.112,00 (10,54 %) pejabat yang ditunjuk dalam rekomendasi BPK untuk membuat kebijakan tidak sesuai dengan kewenangannya.

Catatan : Tindak Lanjut hasil pemeriksaan BPK tersebut adalah berdasarkan data per Semester I 2018, sedangkan untuk data per Semester II 2018 belum mendapatkan data dari BPK.

10. Penguatan Sistem Pengawasan

Pada tahun 2018 Badan Pengawasan telah melaksanakan Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang, Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Consulting dalam rangka Peningkatan Pengawasan yang telah dilaksanakan pada beberapa wilayah yaitu:

- a) Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang dilaksanakan pada 2 lokasi yaitu Padang yang diikuti oleh 122 peserta terdiri dari Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim Pengawas Bidang Tingkat Pertama. Ambon yang diikuti oleh 68 peserta terdiri dari Hakim Pengawas Bidang Tingkat Banding dan Hakim Pengawas Bidang Tingkat Pertama

- b) Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Penguatan Sistem Pengawasan dilaksanakan pada 2 lokasi yaitu Sidoarjo yang diikuti oleh 73 peserta terdiri dari Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Hakim Pengawas Daerah, dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah. Bekasi yang diikuti oleh 65 peserta terdiri dari Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Hakim Pengawas Daerah.
- c) Consulting dalam rangka Peningkatan Pengawasan dilaksanakan pada 2 lokasi yaitu Pontianak yang diikuti oleh 89 peserta terdiri dari Wakil Ketua Pengadilan/ Hakim Senior, Sekretaris, Panitera, dan PPK. Yogyakarta yang diikuti oleh 112 peserta terdiri dari Ketua Pengadilan/ Wakil Ketua Pengadilan, Panitera/ Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen, Kasir.
- d) Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) telah dilaksanakan pada 2 lokasi yaitu Banjarmasin yang diikuti oleh 116 peserta yang terdiri dari Panitera, Sekretaris, PPK, Panitera Muda Banding (PT dan PTA), Panitera Muda Perdata (PN), Panitera Muda Gugatan (PA), Panitera Muda Pidana (Dilmil), Panitera Muda Perkara (PTUN). Aceh yang diikuti oleh 123 peserta terdiri dari Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Panitera, Pejabat Pembuat Komitmen/ Bendahara.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	vii
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	20
C. Sistematika Penyajian	23
II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	25
A. Rencana Strategis 2015 – 2019	25
1. Visi dan Misi	25
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	26
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	27
C. Rencana Kinerja Tahun 2018	27
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	29
E. Capaian Kinerja Badan Pengawasan	34
III. Akuntabilitas Kinerja	36
A. Pengukuran Kinerja	36
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	37
C. Akuntabilitas Anggaran Kinerja	54
IV. Penutup.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56

Lampiran-lampiran :

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Matrik Rencana Strategis 2015– 2019
4. SK Kepala Badan Pengawasan tentang Tim LKjIP
5. Rencana Kinerja Tahun 2017, 2018, 2019
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2018, 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Pengadilan, oleh karena itu Badan Pengawasan secara terus menerus berupaya memberikan pelayanan yang ideal, efektif dan efisien yang dapat memperkuat fungsi pengawasan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas sepanjang tahun 2018 Badan Pengawasan telah melakukan pengawasan intern yang merupakan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, dan kegiatan pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pengawasan yang lebih baik.

Dalam rangka lebih mengoptimalkan kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya, Badan Pengawasan pada tahun 2018 telah melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Pembinaan dan Pengelolaan SDM

Pada tahun 2018, jumlah sumber daya manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berjumlah 162 orang, yang terdiri dari Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural, staf dan Honorer. Jumlah aparatur pada Badan Pengawasan yang berjumlah 162 orang terdiri dari tenaga teknis yudisial 55 orang, tenaga non teknis yudisial 90 orang dan tenaga honorer 17 orang.

Sekretariat Badan Pengawasan Mahkamah Agung-RI pada tahun 2018 telah mengadakan peningkatan SDM dengan cara mengikutsertakan Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan Staf untuk mengikuti Diklat dan Bimtek sebanyak 17 Diklat dan Bimtek.

Pembinaan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel 1.1: Diklat dan Bimtek Tahun 2018

No	Nama Bimtek	Jumlah peserta	Penyelenggara	Tujuan
1	Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja Semester II Tahun Anggaran 2017	2 orang	KPPN Jakarta VI	Peningkatan Kompetensi SDM
2	Diklat Substantif Manajemen Resiko di Lingkungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	26 orang	Badan Pengawasan MAR	Peningkatan Kompetensi SDM
3	Diklat Sertifikasi Training of Trainer (TOT)	2 orang	Litbang Diklat Kumdil MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
4	Sosialisasi Aplikasi e- Monev	3 orang	Bappenas	Peningkatan Kompetensi SDM
5	Diklat Penjenjangan Auditor Muda	2 orang	BPKP	Peningkatan Kompetensi SDM
6	Pelatihan Assesor	4 orang	Mahkamah Agung RI	Peningkatan Kompetensi SDM
7	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka Peningkatan Capability Aparatur Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk menunjang Reformasi Birokrasi	150 orang	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Peningkatan Kompetensi SDM
8	Bimtek Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian	9 orang	BKN Pusat	Peningkatan Kompetensi SDM
9	Diklat Substantif Manajemen Resiko	24 orang	Badan Pengawasan	Peningkatan Kompetensi

			MARI	SDM
10	Assesment (Hakim Tinggi Tingkat Banding, Hakim Tingkat Pertama dan staf Bawas)	27 orang	Badan Pengawasan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
11	Assesment	4 Orang	Badan Pengawasan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
12	Sosialisasi Per-13/PB/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2018	3 Orang	KPPN Jakarta VI	Peningkatan Kompetensi SDM
13	Pendidikan dan Pelatihan Auditor Ahli Pertama	1 Orang	BPKP	Peningkatan Kompetensi SDM
14	Pelatihan Penjenjangan Auditor Kepegawaian Tingkat I (Auditor Kepegawaian Pratama)	4 Orang	BKN	Peningkatan Kompetensi SDM
15	Diklat Pembentukan Auditor Ahli Pratama di lingkungan APIP	6 Orang	BPKP	Peningkatan Kompetensi SDM
16	Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan UAKPA TA 2018	2 Orang	KPPN Jakarta VI	Peningkatan Kompetensi SDM
17	Bimtek Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	40 Orang	Badan Pengawasan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM

2. Penanganan Pengaduan

Tahun 2018 jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung sejumlah 3.080 pengaduan, dengan rincian :

A. Penanganan Pengaduan yang masuk

- 1) Pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan, sejumlah 2.119 pengaduan
- 2) Pengaduan dari Instansi / Stakeholder Mahkamah Agung, sejumlah 523 Pengaduan
- 3) Pengaduan dari Aplikasi SIWAS sejumlah 380 Pengaduan
- 4) Pengaduan dari SATGAS sejumlah 58 Pengaduan

B. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

- 1) Pengaduan masih dalam proses sejumlah 919 pengaduan
- 2) Pengaduan yang selesai diproses sejumlah 2.161 pengaduan
 - a) Pengaduan di tindaklanjuti
 - Diperiksa Tim Pemeriksa sejumlah 207 Pengaduan
 - Delegasi ke Tingkat Banding sejumlah 49 Pengaduan
 - Delegasi ke Tingkat Pertama sejumlah 477 Pengaduan
 - Memorandum/ Delegasi Internal sejumlah 153 Pengaduan
 - Dijawab surat (instansi) sejumlah 263 Pengaduan
 - b) Pengaduan tidak ditindaklanjuti
 - Dijawab Surat sejumlah 631 Pengaduan
 - Diarsipkan sejumlah 381 Pengaduan

Catatan :

Pengaduan yang ditindaklanjuti adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- ❖ Pengaduan dengan identitas Pelapor yang jelas dan substansi/materi Pengaduan yang logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan guna membuktikan kebenaran informasinya.
- ❖ Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, namun substansi/materi Pengaduannya logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan guna membuktikan kebenaran informasinya.
- ❖ Pengaduan dengan identitas Pelapor jelas, namun substansi/materi Pengaduan kurang jelas dapat direkomendasikan untuk di konfirmasi atau di klarifikasi sebelum dilakukan pemeriksaan.
- ❖ Pengaduan dengan permasalahan serupa dengan Pengaduan yang sedang atau telah dilakukan pemeriksaan, direkomendasikan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi.

Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti adalah Pengaduan dengan kriteria sebagai berikut:

- ❖ Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, tidak disertai data yang memadai dan tidak menunjang informasi yang diadukan.
- ❖ Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas dan tidak menunjuk substansi secara jelas, misalnya Pengaduan penanganan perkara yang tidak adil (tidak fair), yang tidak disertai dengan nama pengadilan, tempat kejadian atau nomor perkara dimaksud.
- ❖ Pengaduan dimana Terlapor sudah tidak lagi bekerja sebagai hakim dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara di pengadilan, misalnya telah pensiun, telah pindah ke instansi lain.
- ❖ Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat yang berwenang.
- ❖ Pengaduan mengenai keberatan terhadap pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan.
- ❖ Pengaduan mengenai pihak atau instansi lain di luar yurisdiksi pengadilan, misalnya mengenai Advokat, Jaksa atau Polisi.
- ❖ Pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak ada Pengaduan sebelumnya.
- ❖ Pengaduan berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi, oleh karena merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding, kecuali terdapat perilaku yang tidak profesional (*unprofessional conduct*).
- ❖ Keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin.

Terhadap Pengaduan yang tidak dapat ditindak lanjuti, diberitahukan alasannya kepada Pelapor, dalam hal:

- ❖ Pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan disarankan agar diajukan melalui mekanisme upaya hukum;
- ❖ Terlapor bukan pihak atau instansi lain di luar yurisdiksi pengadilan disarankan agar disampaikan kepada instansi yang berwenang; dan
- ❖ Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat yang berwenang.

3. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Sebagai tindaklanjut surat pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I, pada tahun 2018 Badan Pengawasan telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 163 aparat peradilan, yaitu :

- a) Hakim, sejumlah 101 orang
- b) Hakim Ad Hoc, sejumlah 2 orang
- c) Panitera, sejumlah 6 orang
- d) Sekretaris, sejumlah 4 orang
- e) Panitera Muda, sejumlah 5 orang
- f) Panitera Pengganti, sejumlah 19 orang
- g) Jusrita, sejumlah 4 orang
- h) Jusrita Pengganti, sejumlah 5 orang
- i) Pejabat Struktural, sejumlah 7 orang
- j) Staf, sejumlah 10 orang

4. Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial, melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 2 orang hakim, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2: Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2018

NO	NAMA	JABATAN	JENIS HUKUMAN/KETERANGAN
1	J W L, S.H	Hakim PN. Yogyakarta	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun)
2	E W	Hakim PN. Kupang	Berdasarkan surat keputusan Presiden No. 149/P yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatan hakim di Lingkungan Peradilan Umum, sehingga sidang Majelis Kehormatan Hakim tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus pelanggaran perilaku hakim.

5. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan telah melakukan kegiatan selaku APIP sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.3 : Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP

No	Kegiatan	Resume Hasil Pemeriksaan
1	Reviu Laporan Keuangan	Dilaksanakan reviu laporan keuangan sebanyak 3 (tiga) kali meliputi reviu: 1) Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2017 pada bulan Februari 2018; 2) Laporan Keuangan Semester Pertama Tahun Anggaran 2018 pada bulan Juli 2018; 3) Laporan Keuangan Triwulan III Komprehensif Tahun Anggaran 2018 pada bulan Nopember 2018. Catatan : Laporan Keuangan MA RI TA 2017 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2	Reviu RKA K/L	Dilaksanakan pada Mahkamah Agung RI dan reviu RKA-KL di 3 (tiga) wilayah selama bulan September 2018 yaitu: 1. Reviu RKA K/L wilayah Sulawesi Utara; 2. Reviu RKA K/L wilayah Sumatera Barat; 3. Reviu RKA K/L wilayah Nusa Tenggara Timur
3	Reviu RKBMN Online	Dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Oktober 2018 di Mahkamah Agung RI untuk TA 2020
4	Reviu Tender Pra DIPA dan Reviu PA PBJ	- Berdasarkan hasil reviu dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi belanja telah mencapai lebih dari 80% dari rencana penyerapannya, yakni dengan rincian sebagai berikut: - Belanja Pegawai mencapai 97,16% senilai Rp6.117,8 Milyar - Belanja Barang mencapai 95,37% senilai Rp1.225,8 Milyar - Belanja Modal mencapai 98,44% senilai Rp588,3 Milyar - Berdasarkan Skoring Kualitas Belanja yang dikembangkan BPKP maka nilai Kualitas Belanja Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya mencapai 88,75 yakni Perdikat Kualitas Belanja Sangat Baik. - Berbeda halnya dengan capaian kualitas belanja di tahun 2017 lalu, Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang Jasa Pra-DIPA sampai dengan 25 Januari 2018 hanya sebanyak 13 (tigabelas) Paket atau hanya sebesar 3%

		(tiga persen) dari jumlah Paket PBJ Tahun 2018 dengan nilai Rp35.995.300.000,- atau sekitar 8% (delapan persen) dari Nilai PBJ Tahun 2018.
5	Pemeriksaan Keuangan	Secara umum, pengelolaan keuangan DIPA dan keuangan perkara telah dilakukan pengendalian intern secara efektif, namun masih ditemukan kesalahan administratif yang berdampak pada kerugian negara yang diselesaikan melalui mekanisme penyetoran ke kas negara atau proses tuntutan ganti rugi (TGR), sedangkan untuk kesalahan yang bersifat perbaikan pencatatan administrasi sudah ditindaklanjuti dengan perbaikan pada saat berlangsungnya pemeriksaan sehingga diharapkan permasalahan tersebut tidak terulang di tahun berikutnya
6	Audit Pengadaan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Secara umum, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah telah memperhatikan ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat penyelesaian pembangunan yang tidak tepat waktu dan terdapat kekurangan volume pekerjaan; - Pemanfaatan pengadaan berbasis elektronik melalui <i>e-purchasing</i> belum optimal
7	<i>Consulting dan Assurance</i>	Pada tahun 2018 QA dilakukan sebanyak 4 kali
8	<i>Liaison Officer (LO)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017 dengan hasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 6 (enam) kali berturut-turut. 2. Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak, Keuangan Perkara, Uang Titipan Pihak Ketiga dan Belanja Tahun Anggaran 2017 Sampai Dengan Semester I Tahun 2018 pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. 3. Pemeriksaan Pendahuluan atas Pelayanan Peradilan dan Pengeolaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. 4. Pemeriksaan Terinci atas Pelayanan Peradilan dan Pengeolaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. 5. Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik

		<p>Negara Tahun 2017 di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.</p> <p>6. Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2018 di wilayah Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur.</p>
--	--	---

6. Kegiatan Pemeriksaan Reguler

a. Pemeriksaan Reguler

Tahun 2018 Badan Pengawasan melakukan pemeriksaan Reguler pada 129 Satuan Kerja (Satker). Pemeriksaan Reguler pada Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 71 satker. Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 46 satker. Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 5 satker, Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 6 satker dan Pengadilan pajak berjumlah 1 satker.

Temuan hasil pemeriksaan reguler tersebut, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Manajemen Peradilan, temuannya sejumlah 415 temuan, dimana temuan tersebut didasarkan pada beberapa temuan yaitu Program Kerja, Evaluasi Kegiatan, Standar Pelayanan, dll.
- 2) Administrasi Perkara, temuannya sejumlah 924 temuan, dimana temuan tersebut didasarkan pada beberapa temuan yaitu Uang Konsinyasi, Bunga Bank yang berasal dari rekening penampungan perkara belum disetor ke Bank, selisih pada penutupan seluruh pembukuan keuangan perkara, dll.
- 3) Administrasi Persidangan, temuannya sejumlah 722 temuan, dimana temuan tersebut didasarkan pada beberapa temuan yaitu Persidangan, Minutasi Berkas Perkara, dll.
- 4) Administrasi Umum, temuannya sejumlah 1.775 temuan, dimana temuan tersebut didasarkan pada beberapa temuan yaitu Panjar biaya eksekusi diterima tunai tidak melalui Bank dan disimpan dalam brankas Pengadilan, Pengadaan alat pengolah data tidak menggunakan e-purchasing menyebabkan adanya Indikasi kemahalan harga, dll.
- 5) Kinerja Pelayanan Publik, temuannya sejumlah 525 temuan, dimana temuan

tersebut didasarkan pada beberapa temuan yaitu Penanganan Pengaduan, Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Bantuan Hukum (Posbakum), dll.

b. Reguler Pendampingan

Pada tahun 2018 Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah melaksanakan pengawasan Reguler Pendampingan pada 23 Satuan Kerja (Satker). Pemeriksaan Reguler pada Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 12 satker. Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 10 satker dan Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 1 satker.

c. Pemeriksaan Reguler Bersama KPK dan BPKP

Badan Pengawasan Mahkamah Agung bekerjasama dengan KPK dan BPKP untuk melakukan pemeriksaan reguler bersama pada beberapa Pengadilan yang dijadikan sampling uji petik terhadap Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tinggi Palembang, dan Pengadilan Negeri Palembang.

7. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud untuk meningkatkan transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi oleh karena itu kegiatan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilakukan.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung melakukan evaluasi terhadap satker eselon I Pusat dan Peradilan Tingkat Banding berjumlah 74 satker, evaluasi dimaksud adalah untuk:

- a. Memberikan penilaian terhadap penerapan SAKIP;
- b. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP;
- c. Memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas Unit/Satuan Kerja
- d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Tabel 1.4: Hasil Evaluasi LkjIP pada Inspektur Wilayah I

No	Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2017 (Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2018)					
	Nilai	Kategori	PT	PTA	PT TUN	DILMIL TI
1	>90 – 100	AA	-	-	-	-
2	>80 – 90	A	2	-	-	-
3	>70 – 80	BB	6	5	1	1
4	>60 – 70	B	1	1	-	-
5	>50 – 60	CC	-	3	-	-
6	>30 – 50	C	-	-	-	-
7	0 – 30	D	-	-	-	-
Jumlah			9	9	1	1

Tabel 1.5: Hasil Evaluasi LkjIP pada Inspektur Wilayah II

No	Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2017 (Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2018)							
	Nilai	Kategori	PT	PTA	PT TUN	DILMIL TI	DILMIL TAMA	ESELON I
1	>90 – 100	AA	-	-	-	-	-	-
2	>80 – 90	A	-	-	-	-	-	-
3	>70 – 80	BB	5	5	-	2	1	4
4	>60 – 70	B	-	-	1	-	-	2
5	>50 – 60	CC	2	1	1	-	-	1
6	>30 – 50	C	-	-	-	-	-	-
7	0 – 30	D	-	-	-	-	-	-
Jumlah			7	6	2	2	1	7

Tabel 1.6: Hasil Evaluasi LkjIP pada Inspektur Wilayah III

No	Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2017 (Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2018)					
	Nilai	Kategori	PT	PTA	PT TUN	DILMIL TI
1	>90 – 100	AA	-	-	-	-
2	>80 – 90	A	-	-	-	-
3	>70 – 80	BB	5	7	1	-
4	>60 – 70	B	2	2	-	-
5	>50 – 60	CC	2	-	-	-
6	>30 – 50	C	-	-	-	-
7	0 – 30	D	-	-	-	-
Jumlah			9	9	1	0

Tabel 1.7: Hasil Evaluasi LkjIP pada Inspektur Wilayah IV

No	Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2017 (Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2018)					
	Nilai	Kategori	PT	PTA	PT TUN	DILMIL TI
1	>90 – 100	AA	-	-	-	-
2	>80 – 90	A	-	1	-	-
3	>70 – 80	BB	4	2	-	-
4	>60 – 70	B	1	2	-	-
5	>50 – 60	CC	-	-	-	-
6	>30 – 50	C	-	-	-	-
7	0 – 30	D	-	-	-	-
Jumlah			5	5	0	0

Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2017 (pelaksanaan Tahun 2018) terdapat 3 Satker (4,05%) memperoleh nilai A, 49 Satker (66,21%) memperoleh nilai BB, 12 Satker (16,21%) memperoleh nilai B, dan 10 Satker (13,51%) memperoleh nilai CC. Jika dibandingkan dengan Hasil Evaluasi LkjIP Tahun 2016 (pelaksanaan Tahun 2017) ada kecenderungan nilai A dan nilai BB meningkat. Untuk melakukan evaluasi Laporan Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama adalah merupakan kewajiban pengadilan tingkat banding sesuai wilayah hukumnya

Tabel 1.8 : Nilai Evaluasi LKjIP Tahun 2017 Satker Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding (Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2018)

NO.	NAMA SATKER	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI INTERNAL	PENCAPAIAN KINERJA	SKOR	KATEGORI
		BOBOT 30%	BOBOT 25%	BOBOT 15%	BOBOT 10%	BOBOT 20%		
1	BADAN PENGAWASAN	21,67	19,38	12,00	7,75	15,00	75,79	BB
2	BUA	24,02	15,58	13,17	7,75	13,33	73,85	BB
3	KEPANITERAAN	24,11	18,16	13,41	6,25	13,33	75,25	BB
4	DITJEN BADILAG	26,96	21,68	12,25	2,75	12,92	76,56	BB
5	DITJEN BADILUM	19,60	18,36	10,34	5,50	15,00	68,81	B
6	DITJEN BADIMILTUN	21,06	18,00	10,34	5,50	10,63	65,53	B
7	BALITBANG DIKLAT KUMDIL	12,65	16,97	10,22	1,25	9,38	50,46	CC
8	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	14,11	21,42	13,41	6,38	15,00	70,32	BB
9	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	22,71	19,11	11,34	6,79	16,04	75,99	BB

10	PENGADILAN TINGGI MEDAN	21,99	18,63	10,97	7,00	8,96	67,55	B
11	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	25,01	20,79	13,41	6,38	18,33	83,92	A
12	PENGADILAN TINGGI JAMBI	21,87	17,84	11,30	6,67	12,71	70,39	BB
13	PENGADILAN TINGGI PEKANBARU	25,39	20,16	13,17	8,29	16,04	83,05	A
14	PENGADILAN TINGGI PADANG	24,35	19,38	12,05	7,88	11,25	74,91	BB
15	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	23,38	19,78	9,52	6,29	12,92	71,89	BB
16	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	22,77	19,75	11,95	6,79	16,04	77,30	BB
17	PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA	25,31	19,02	10,88	6,88	16,25	78,34	BB
18	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	24,85	19,52	10,17	7,42	10,00	71,96	BB
19	PENGADILAN TINGGI BANTEN	22,58	18,00	12,47	6,92	12,92	72,89	BB
20	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	19,81	12,96	11,16	4,88	10,00	58,81	CC
21	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	23,37	20,00	11,67	7,54	11,67	74,25	BB
22	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	20,27	15,42	11,16	5,08	6,67	58,60	CC
23	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	24,59	19,11	12,00	7,67	13,33	76,70	BB
24	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	14,41	13,75	7,97	5,83	12,25	54,21	CC
25	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	21,26	13,75	12,00	7,00	15,00	69,01	B
26	PENGADILAN TINGGI MANADO	20,94	15,69	8,53	5,50	7,29	57,95	CC
27	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	22,68	19,38	11,44	7,00	10,00	70,50	BB
28	PENGADILAN TINGGI PALU	19,90	16,06	12,00	7,75	11,88	67,59	B
29	PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	24,41	19,75	12,23	7,00	15,00	78,39	BB
30	PENGADILAN TINGGI KENDARI	22,89	19,38	11,67	7,00	13,33	74,27	BB
31	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	22,89	19,38	10,88	7,00	11,67	71,82	BB
32	PENGADILAN TINGGI GORONTALO	22,48	18,48	11,16	7,33	11,67	71,12	BB
33	PENGADILAN TINGGI KUPANG	19,14	18,25	10,78	5,83	11,88	65,88	B
34	PENGADILAN TINGGI MALUKU	22,61	19,41	10,69	5,92	12,92	71,55	BB

	UTARA							
35	PENGADILAN TINGGI MATARAM	24,76	20,16	12,28	7,00	15,21	79,41	BB
36	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	22,23	19,38	11,44	5,83	11,88	70,76	BB
37	PENGADILAN TINGGI AMBON	22,86	19,41	10,69	5,92	12,92	71,80	BB
38	MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH	16,40	19,38	11,11	7,54	10,00	64,43	B
39	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	17,05	18,28	8,30	3,25	8,33	55,21	CC
40	PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	21,67	20,53	13,41	8,08	15,00	78,69	BB
41	PENGADILAN TINGGI AGAMA BABEL	23,22	19,41	11,30	0,00	0,00	53,93	CC
42	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	23,34	19,78	10,69	8,08	15,00	76,89	BB
43	PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	24,35	19,38	12,05	7,88	11,25	74,91	BB
44	PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	23,98	19,90	11,77	7,96	13,96	77,57	BB
45	PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	24,33	20,53	12,47	7,33	15,00	79,66	BB
46	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	17,56	17,88	9,94	4,50	10,00	59,88	CC
47	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	23,39	19,38	12,23	7,67	15,00	77,67	BB
48	PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA	24,81	19,00	12,70	7,96	15,00	79,47	BB
49	PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	19,03	12,96	10,88	4,00	10,00	56,87	CC
50	PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	24,61	19,74	11,67	7,88	13,33	77,23	BB
51	PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA	24,57	19,00	11,95	7,75	15,00	78,27	BB
52	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	22,66	19,02	10,88	6,38	16,67	75,61	BB
53	PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	23,79	19,00	11,67	7,00	15,00	76,46	BB
54	PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	23,90	19,38	10,88	7,00	12,29	73,45	BB
55	PENGADILAN TINGGI AGAMA	20,28	16,70	11,48	7,75	15,00	71,21	BB

	SAMARINDA							
56	PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	22,81	19,11	10,73	7,13	12,29	72,07	BB
57	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	21,95	18,63	11,44	7,00	10,00	69,02	B
58	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	22,85	19,38	10,88	7,00	10,00	70,11	BB
59	PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	22,06	17,50	10,88	7,00	12,29	69,73	B
60	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	23,05	19,38	11,67	7,00	12,29	73,39	BB
61	PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	21,26	17,59	12,00	7,75	16,04	74,64	BB
62	PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA	22,53	19,41	8,95	5,92	12,92	69,73	B
63	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	20,56	19,00	10,88	7,21	12,29	69,94	B
64	PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	25,78	20,16	11,86	7,00	16,25	81,05	A
65	PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	24,90	20,16	12,05	7,00	13,54	77,65	BB
66	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	23,53	19,52	9,89	7,54	15,00	75,48	BB
67	PENGADILAN TINGGI TUN MEDAN	20,98	19,38	10,73	5,83	15,00	71,92	BB
68	PENGADILAN TINGGI TUN JAKARTA	23,72	17,09	8,53	6,58	8,33	64,25	B
69	PENGADILAN TINGGI TUN SURABAYA	20,78	13,89	11,16	5,50	8,33	59,66	CC
70	PENGADILAN TINGGI TUN MAKASSAR	22,96	19,00	11,67	7,08	10,63	71,34	BB
71	DILMILTAMA	21,46	19,38	10,88	6,25	13,96	71,93	BB
72	DILMILT I MEDAN	23,01	19,90	10,13	5,21	13,96	72,21	BB
73	DILMILT II JAKARTA	20,97	19,02	10,41	6,88	15,63	72,91	BB
74	DILMILT III SURABAYA	24,02	19,00	11,91	7,46	15,00	77,39	BB
	JUMLAH	1644,01	1377,00	834,15	483,87	940,20	5279,21	
	RATA-RATA	22,22	18,61	11,27	6,54	12,71	71,34	BB

8. Pemeriksaan Kinerja dan Integritas

Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai pengawas Internal pada tahun 2018 telah melakukan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas yang berorientasi pada pengelolaan keuangan Negara, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 100 Satker.

Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas Pada Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 57 satker. Di Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 30 satker. Di Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 7 satker dan di Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 6 satker.

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan sebagai berikut:

- 1) Hasil Temuan Bidang Pelayanan Publik, meliputi :
 - a) Kualitas Standar Pelayanan sejumlah 163 temuan
 - b) Kualitas Sistem Informasi Pelayanan sejumlah 72 temuan
 - c) Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan sejumlah 77 temuan
 - d) Proses Penanganan Pengaduan sejumlah 73 temuan

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang pelayanan publik menggambarkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik kurang maksimal sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan temuan kualitas standar pelayanan mencapai 163 temuan (42,33%) sedangkan terkait kualitas sistem informasi pelayanan terdapat 72 temuan (18,70 %). Pada indikator lain terkait Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik terdapat 77 temuan (20%) dan terkait proses penanganan pengaduan terdapat 73 temuan (18,96%).

- 2) Hasil Temuan Bidang PNBP
 - a) Pemungutan PNBP jumlah 26 temuan
 - b) Penyetoran PNBP jumlah 65 temuan
 - c) Penatausahaan PNBP jumlah 61 temuan

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang PNBP menggambarkan bahwa temuan terkait penyetoran PNBP lebih dominan yakni mencapai 65 temuan (42,76%), sehingga perlu dilakukan langkah – langkah guna mendorong terlaksananya penyetoran PNBP sesuai aturan yang berlaku (pengawasan intern).

3) Jenis Temuan Bidang Keuangan Perkara

- a) Panjar Biaya Perkara jumlah 121 temuan
- b) Penatausahaan Persediaan dari Biaya Proses jumlah 162 temuan
- c) Pengembalian Sisa Panjar jumlah 53 temuan
- d) Pengembalian Biaya Perkara tidak melalui Bank jumlah 5 temuan

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Keuangan Perkara menggambarkan bahwa temuan terkait penatausahaan persediaan dari biaya proses lebih dominan yakni mencapai 162 temuan (47,50%), sehingga diperlukan kebijakan baru berkaitan dengan sistem penatausahaan persediaan yang dibiayai dari biaya proses.

9. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

- a. Temuan pemeriksaan BPK RI sejak tahun 2005 sampai dengan semester I tahun 2018 sebanyak **488** temuan pemeriksaan dengan **986** rekomendasi. Hingga Semester I tahun 2018 sebanyak **797** rekomendasi atau sebesar **80,83%** sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan rekomendasi BPK, sebanyak 64 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut, **114** rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah dan 11 rekomendasi belum ditindaklanjuti.
- b. Total nilai temuan pemeriksaan BPK sejak tahun 2005 sampai dengan semester I tahun 2018 sebesar **Rp43.166.669.702,74** nilai rekomendasi sebesar **Rp32.952.953.713,63**. Hingga Semester I Tahun 2018 sebesar **Rp24.273.013.323,80** sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan rekomendasi atau sebesar 73,66 %, nilai yang masih dalam proses tindak lanjut sebesar Rp4.682.812.459,00 atau sebesar 14,21 % dan nilai sebesar Rp523.228.818,83 atau sebesar 1,59 % tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Total nilai aset atau penyeteroran uang ke kas negara sejak tahun 2005 sampai dengan Semester I tahun 2018 sebesar **Rp26.549.410.435,12**.

Mahkamah Agung telah menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) sampai dengan semester I Tahun 2018 sebesar 80,83 %, sisa yang belum ditindaklanjuti sejumlah Rp.3.473.899.112,00 (10,54 %) pejabat yang ditunjuk dalam rekomendasi BPK untuk membuat kebijakan tidak sesuai dengan kewenangannya.

Catatan : Tindak Lanjut hasil pemeriksaan BPK tersebut adalah berdasarkan data per Semester I 2018, sedangkan untuk data per Semester II 2018 belum mendapatkan data dari BPK.

10. Penguatan Sistem Pengawasan

a) Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang serta Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Penguatan Sistem Pengawasan

Penguatan Sistem Pengawasan antara lain dilakukan dengan Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan serta Sistem Pengawasan Aparatur Peradilan pada Seluruh Pengadilan Tingkat Banding.

Adapun materi yang disampaikan dari Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang, Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Penguatan Sistem Pengawasan tersebut di atas sebagai berikut:

- 1) Manajemen Peradilan
- 2) Administrasi Perkara
- 3) Administrasi Persidangan
- 4) Administrasi Umum
- 5) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
- 6) Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
- 7) Gratifikasi.

b) Consulting dalam rangka Peningkatan Pengawasan

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan masih dijumpai sebagian para Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara dan Kasir yang belum optimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya, hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi serta kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan melekat, demi mendorong tumbuhnya kesadaran para Aparatur Peradilan di bidang sistem pengawasan aparat peradilan, maka Badan Pengawasan mengadakan kegiatan *Consulting* dengan materi-materi meliputi Pemuliaan Peradilan dan Peningkatan Pengawasan.

Kegiatan *Consulting* diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Hakim, Panitera, Sekretaris dan Aparatur Peradilan dalam melaksanakan bidang pengawasan.

c) Penjaminan Kualitas (Quality Assurance)

Quality Assurance adalah salah satu program Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian, adanya jaminan atas kualitas penyelenggaraan tugas pokok, baik yang terkait dengan output yang dihasilkan maupun yang berkaitan dengan proses yang diperlukan dan pelayanan yang diberikan. Karena itu Quality Assurance sebuah kegiatan yang meliputi usaha pemantauan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti berbagai temuan atas kinerja yang dilakukan, yaitu dengan diadakannya Focus Group Discussion (FGD) yang dapat menjadi wadah bagi seluruh peserta untuk mengemukakan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok untuk membahas temuan yang berkaitan dengan :

- Keuangan perkara dan keuangan DIPA.
- Memastikan bahwa seluruh proses atau prosedur kegiatan yang telah direncanakan diimplementasikan sesuai dengan standar / ketentuan yang berlaku.
- Membahas permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan berbasis akuntansi akrual sebagai dampak masa transisi dari pelaporan keuangan berbasis kas ke basis akrual dimana permasalahan pelaporan keuangan berbasis akrual relatif lebih kompleks dibanding pelaporan keuangan berbasis kas pada tahun sebelumnya.

Data permasalahan yang ditampung dari hasil FGD dibedakan atas:

- a) Permasalahan yang telah ada atau jelas regulasinya langsung diberikan pemecahan berdasarkan aturan atau regulasi yang telah ada.
- b) Permasalahan yang belum ada atau belum jelas regulasinya ditampung oleh Badan Pengawasan untuk dijadikan bahan informasi atau diskusi dengan Ditjen terkait agar dapat segera dirumuskan kebijakan sesuai kebutuhan dilapangan.

Hasil pembahasan QA secara garis besar yakni :

1. Pengelolaan keuangan DIPA dan Pengelolaan Barang Milik Negara harus berpedoman pada prinsip efektif, efisien dan ekonomis.
2. Keuangan Perkara dan Uang titipan pihak ketiga harus berpedoman pada kebijakan Mahkamah Agung.

3. Badan Pengawasan melakukan identifikasi resiko dalam pengelolaan keuangan DIPA dan keuangan Perkara sehingga diperoleh peta resiko beserta mitigasinya.

Pada tahun 2018 kegiatan Quality Assurance (penjaminan kualitas) telah dilaksanakan pada 2 lokasi yaitu Banjarmasin yang diikuti oleh 116 peserta terdiri dari Panitera, Sekretaris, PPK, Panitera Muda Banding (PT dan PTA), Panitera Muda Perdata (PN), Panitera Muda Gugatan (PA), Panitera Muda Pidana (Dilmil), Panitera Muda Perkara (PTUN). Aceh yang diikuti oleh 123 peserta terdiri dari Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Panitera, Pejabat Pembuat Komitmen/ Bendahara.

B. Tugas dan Fungsi

Badan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan;
- b) Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Pelaksanaan administrasi Badan Pengawasan;

Badan Pengawasan terdiri dari :

1. Sekretariat Badan Pengawasan;
2. Inspektorat Wilayah I;
3. Inspektorat Wilayah II;
4. Inspektorat Wilayah III;
5. Inspektorat Wilayah IV.

- 1) Sekretariat Badan Pengawasan;

Sekretariat Badan Pengawasan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Badan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dan penyusunan anggaran, serta perbendaharaan dan pembuatan akuntansi dan laporan keuangan;
- b) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c) Pelaksanaan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja;
- d) Pelaksanaan urusan dokumentasi dan manajemen sistem informasi;
- e) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Pengawasan.

2) Inspektorat Wilayah I;

Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah I yang meliputi : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah I;
- b) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah I;
- c) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah I;
- d) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah I;
- e) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah I;
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah I.

3) Inspektorat Wilayah II;

Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah II yang meliputi :

Banten, DKI Jakarta (termasuk unit organisasi yang ada di Mahkamah Agung), Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah II;
- b) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah II;
- c) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah II;
- d) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah II;
- e) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah II;
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah II.

4) Inspektorat Wilayah III;

Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah III yang meliputi : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah III;
- b) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah III;
- c) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah III;
- d) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah III;
- e) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah III;
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah III.

5) Inspektorat Wilayah IV.

Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di Wilayah IV yang meliputi : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya (Papua).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah IV;
- b) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah IV;
- c) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah IV;
- d) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah IV;
- e) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah IV;
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah IV.

Ruang lingkup pengawasan meliputi : penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi, administrasi, finansial peradilan dan perilaku aparatur pengadilan, sedangkan sasaran pengawasan meliputi : lembaga peradilan, yang meliputi Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKjIP Badan Pengawasan Tahun 2018 dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

I. Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Tugas dan Fungsi
- c. Sistematika Penyajian

II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. Rencana Strategis 2015 - 2019

1. Visi dan Misi
2. Tujuan dan Sasaran Strategis

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

C. Rencana Kinerja Tahun 2018

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

E. Capaian Kinerja Badan Pengawasan

III. Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Kinerja

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

C. Akuntabilitas Anggaran Kinerja

IV. Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

Lampiran-Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 - 2019

Rencana Strategis Badan Pengawasan mengacu pada Visi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”, dalam rangka mencapai Visi tersebut Mahkamah Agung RI menetapkan Misi sebagai berikut:

- Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
- Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung, Badan Pengawasan dituntut untuk dapat mengawal dan mewujudkan independensi peradilan serta mempertahankan Laporan Keuangan Mahkamah Agung dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam wujud memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara merespon pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat, melakukan Reviu atas Laporan Keuangan dan perencanaan keuangan.

1. Visi dan Misi

Visi yang telah ditetapkan Badan Pengawasan adalah ” Terwujudnya aparatur peradilan yang bersih dan berwibawa”.

Untuk memenuhi Visi tersebut, Badan Pengawasan menjabarkannya kedalam Misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengawasan melekat dan mengintensifkan pengawasan fungsional;
2. Meningkatkan profesionalisme aparat Badan Pengawasan dan peradilan Tingkat Banding di bidang pengawasan;
3. Terwujudnya fungsi Pengawasan yang efektif dan efisien dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
4. Terwujudnya aparatur yang profesional, bersih, netral, bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Guna melaksanakan Visi dan Misi tersebut Badan Pengawasan telah merumuskan Rencana Strategis untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dan akan dicapai secara nyata dan lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 tahun yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Rencana Strategis Badan Pengawasan MA-RI

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	1077, 1078,5258, 5259 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah	
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi			
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler			
	Jumlah pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas			
	Jumlah pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa			
	Jumlah Satuan Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan			
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan			
	Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana			1079 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung
	Jumlah Pembinaan Hakim Pengawas Bidang			
	Jumlah pegawai yang mengikuti Assesment			
	Jumlah Penguatan APIP / <i>Consulting</i>			
	Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan			

	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan		
	Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan		

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis (Renstra) dan RPJM 2015– 2019.

Indikator Kinerja Utama Badan Pengawasan ditetapkan sebagai berikut :

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	jumlah pengaduan yang diterima dibagi Jumlah pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dikali 100%.	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	jumlah pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dibagi Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dikali 100%.	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Laporan Triwulan website dari Ortala

C. Rencana Kinerja Tahun 2018

Rencana Kinerja (performance plan) Tahun 2018 menggambarkan sasaran, program dan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya sebagaimana yang telah ditetapkan dan digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran.

Penyusunan Rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu dengan indikator pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Untuk mewujudkan sasaran Tahun 2018 Badan Pengawasan menetapkan komitmen kinerja sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	1077, 1078,5258, 5259 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah	001 Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-	
	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (Kasus)	100% (148 LHP)			-	170	Rp5.357.366.000	
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	1. Jumlah pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	89 satker			001 Jumlah LHP Pengawasan di lingkungan Inspektorat wil I, II, III, IV	97	Rp5.489.944.000	
	2. Jumlah pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	78 satker					95	Rp3.456.482.000
	3. Jumlah pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	8 satker					12	Rp 338.629.000
	4. Jumlah Satuan Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan	10 satker					21	Rp 363.361.000
	5. Jumlah Evaluasi LKJIP yang selesai dilakukan	74 LHE					3	Rp 140.983.000
	6. Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	130 orang					2	Rp 839.131.000
	7. Jumlah Penguatan Hakim Pengawas Bidang	130 orang					1	Rp 783.193.000

	8. Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	27 orang				20	Rp 157.700.000
	9. Jumlah Penguatan APIP / Consulting	130 orang				2	Rp 650.565.000
	10. Jumlah Pembinaan Sistem Pengaduan	145 orang				2	Rp 747.660.000
	11. Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	10 LHP			002 Dokumen tata kelola	7	Rp 242.403.000
	12. Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	2 LHP			004 Pelaksanaan MKH	4	Rp 25.940.000

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2018, maka dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pengawasan dengan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Sekretaris Badan Pengawasan dan Inspektur Wilayah I sampai dengan IV Badan Pengawasan dengan Kepala Badan Pengawasan.

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai target yang telah ditentukan dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2018.

1. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengawasan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	100%		Rp5.357.366.000

	(Kasus)			
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	1. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	89 Satker		Rp5.489.944.000
	2. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	78 Satker		Rp3.456.482.000
	3. Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	8 Satker		Rp 338.629.000
	4. Jumlah Satuan Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan	10 Satker		Rp 363.361.000
	5. Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	74 LHE		Rp 140.983.000
	6. Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	130 Orang	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Rp 839.131.000
	7. Jumlah Penguatan Hakim Pengawas Bidang	130 Orang		Rp 783.193.000
	8. Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	27 Orang		Rp 157.700.000
	9. Jumlah Penguatan APIP / Consulting	130 Orang		Rp 650.565.000
	10. Jumlah Pembinaan Sistem Pengaduan	145 Orang		Rp 747.660.000
	11. Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	10 LHP		Rp 242.403.000
	12. Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	2 LHP		Rp 25.940.000

Jumlah Anggaran : **Rp18.593.357.000,-**
 Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan serta Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

2. Perjanjian Kinerja Sekretaris Badan Pengawasan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	130 Orang	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Rp 839.131.000
	Jumlah Penguatan Hakim Pengawas Bidang	130 Orang		Rp 783.193.000
	Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	27 Orang		Rp 157.700.000
	Jumlah Penguatan APIP / Consulting	130 Orang		Rp 650.565.000
	Jumlah Pembinaan Sistem Pengaduan	145 Orang		Rp 747.660.000
	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	10 LHP		Rp 242.403.000
	Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	2 LHP		Rp 25.940.000

Jumlah Anggaran : **Rp 3.446.592.000,-**
 Program : Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

3. Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum,	-
	Persentase pengaduan yang selesai	100%		Rp1.461.066.000

	ditindaklanjuti dan dipublikasi (kasus)		Penanganan Pengaduan	
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	29 Satker		Rp1.540.629.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	25 Satker		Rp 977.117.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	2 Satker		Rp 79.437.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	4 Satker		Rp 143.925.000
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	20 LHE		Rp 35.004.000

Jumlah Anggaran : **Rp4.237.178.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

4. Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (kasus)	100%		Rp1.485.638.000
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	25 Satker		Rp1.753.477.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	25 Satker		Rp 877.177.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa / audit kepegawaian	2 Satker		Rp 40.013.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan	2 Satker		Rp 66.368.000

	keuangan			
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	25 LKjIP		Rp 31.100.000

Jumlah Anggaran : Rp4.253.773.000,-

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

5. Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (kasus)	100%		Rp1.386.742.000
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	20 Satker		Rp1.207.058.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	20 Satker		Rp 937.369.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	2 Satker		Rp 103.754.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	2 Satker		Rp 73.599.000
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	19 LHE		Rp 40.274.000

Jumlah Anggaran : **Rp3.748.796.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

6. Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Meningkatnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (kasus)	100%		Rp1.023.920.000
Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	15 Satker		Rp 988.780.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	8 Satker		Rp 664.819.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	2 Satker		Rp 115.425.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	2 Satker		Rp 79.469.000
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	10 LHE	Rp 34.605.000	

Jumlah Anggaran : **Rp2.907.018.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

E. Capaian Kinerja Badan Pengawasan

Perbandingan capaian kegiatan Badan Pengawasan tahun 2017 dan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 : Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2017

Pemeriksaan / Kegiatan	Wilayah				Jumlah Realisasi	Target	Capaian Persentase
	I	II	III	IV			
Kasus	53	103	49	23	228	170 LHP	134%

Reguler	35	35	36	19	125	114 LHP	110%
Audit PBJ	3	5	3	3	14	13 LHP	108%
Reviu LK dan RKAKL	-	6	-	-	6	2 LHP	300%
Pemeriksaan Kinerja / Integritas	31	33	25	13	102	95 LHP	107%
Pemeriksaan Keuangan	6	12	3	3	24	21 LHP	114%
Evaluasi LkjIP	20	25	19	10	74	74 LHE	100%
Quality Assurance	1	1	-	-	2	2 Kegiatan	100%
Rakor / Sosialisasi Pengaduan	1	1	-	-	2	2 Kegiatan	100%
Sidak	2	12	2	1	17	20 LHP	85%
Monitoring	3	3	3	3	12	12 LHP	100%
TOTAL	155	236	140	75	606	525	136%

* Kegiatan Satgas untuk melakukan pemeriksaan reguler berkaitan dengan penyelesaian perkara dan penegakan disiplin pada Unit Eselon I Mahkamah Agung

Tabel 2.3 : Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2018

Pemeriksaan / Kegiatan	Wilayah				Jumlah Realisasi	Target	Persentase
	I	II	III	IV			
Kasus	46	78	36	21	181	148 LHP	122%
Reguler	49	52	32	19	152	89 LHP	171%
Audit PBJ	3	2	3	3	11	8 LHP	137%
Reviu RKAKL dan Reviu RKBMN	1	2	1	1	5	4 LHP	125%
Reviu LK	0	6	0	0	6	2 LHP	300%
Pemeriksaan Kinerja / Integritas	31	31	26	12	100	78 LHP	128%
Pemeriksaan Keuangan	4	2	2	2	10	10 LHP	100%
Evaluasi LkjIP	20	25	19	10	74	74 LHE	100%
Audit Manajemen Kepegawaian	1	1	1	1	4	4 LHP	100%
Monitoring	3	6	3	3	15	12 LHP	125%
TOTAL	158	205	123	72	558	429	141%

Capaian kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung selama tahun 2018 melebihi target yang direncanakan dari target 100 % yaitu 141%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan melakukan perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kualitas hasil pengukuran dapat dilihat dari indikator keberhasilan sasaran -sasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5
Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat secara transparasi, efektif dan efisien	1. Presentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	100%	122%	122%
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	1. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	89 Satker	152 Satker	171%
	2. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	78 Satker	100 Satker	128%
	3. Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	8 Satker	11 Satker	137%

4. Jumlah Satuan Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan	10 Satker	10 Satker	100%
5. Jumlah Penguatan Hakim Pengawas Bidang	130 orang	201 orang	154%
6. Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	27 orang	27 orang	100%
7. Jumlah Penguatan APIP/ Consulting	130 orang	191 orang	147%
8. Jumlah Pembinaan Sistem Pengaduan	145 orang	157 orang	108%
9. Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	130 orang	236 orang	181%
10. Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	10 LHP	10 LHP	100%
11. Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terlaksana	2 LHP	2 LHP	100%
12. Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	74 LHE	74 LHE	100%

* Capaian : $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Capaian}} \times 100\%$

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Badan Pengawasan dalam melaksanakan Visi dan Misi yang menjadi tanggung jawab organisasi, telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang rincian Analisis capaian masing-masing sasaran dengan indikator-indikator kinerjanya, diuraikan sebagai berikut :



Sasaran 1 : Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat secara transparansi, efektif dan efisien

Sasaran ini terdiri dari 2 indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat secara transparansi, efektif dan efisien

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5
Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat secara transparansi, efektif dan efisien	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	100%	122%	122%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

Indikator kinerja ke - 1 : *Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti*

Tabel 3.3 *Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti*

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2016			2017			2018		
1	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Jumlah pengaduan yang diterima Badan Pengawasan tahun 2018 adalah 3.080 pengaduan yang terdiri dari:

- Pengaduan yang disampaikan ke Badan Pengawasan, sejumlah 2.119 pengaduan
- Pengaduan yang diterima oleh instansi/stakeholder dan diteruskan ke Badan Pengawasan, sejumlah 523 pengaduan
- Pengaduan melalui aplikasi SIWAS, sejumlah 380 pengaduan, dan
- Pengaduan yang diterima SATGAS Badan Pengawasan, sejumlah 58 pengaduan. SATGAS Badan Pengawasan menerima pengaduan dari masyarakat yang datang ke Mahkamah Agung.

Pengaduan tersebut oleh Badan Pengawasan dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu antara lain:

- Masih Dalam Proses : 919 Pengaduan

Surat pengaduan yang disampaikan ke Badan Pengawasan, oleh Kepala Badan Pengawasan didisposisi kepada Inspektur Wilayah I s/d IV dan oleh Inspektur Wilayah I s/d IV diteruskan kepada Hakim Tinggi / Penelaah untuk dilakukan penelaahan apakah pengaduan tersebut dapat atau tidak untuk ditindaklanjuti, pejabat penelaah pada Badan Pengawasan MA RI terdiri dari :

- a. Penelaahan oleh Inspektur Wilayah/Hakim Tinggi Pengawas: apabila materi laporan Pengaduan terkait dengan pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita Pengadilan, Teknis yudisial dan Hukum Acara, Disiplin militer, Mal administrasi dan Pelayanan Publik
- b. Penelaahan oleh Auditor apabila materi laporan Pengaduan terkait dengan pelanggaran Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.
- c. Penelaahan oleh Auditor Kepegawaian apabila terkait pelanggaran Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara; Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Disamping itu surat pengaduan yang menjadi kasus atau dibentuk Tim, namun belum bisa dilaksanakan karena terkait anggaran, administrasi pembuatan surat, penggabungan surat delegasi, proses pembuatan surat pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Kamar Pengawasan.

- Diperiksa Badan Pengawasan: 207 pengaduan

Tim Pemeriksa Badan Pengawasan melakukan pemeriksaan pada satker dimana pengaduan berasal. Hasil pemeriksaan dibuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa kepada Kepala Badan Pengawasan dan oleh Kepala Badan Pengawasan dibuat surat pengantar rekomendasi dari Tim Pemeriksa kepada Ketua Kamar Pengawasan. Bila Pengaduan terbukti maka dibuat Memorandum yang diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung dan setelah disetujui oleh Ketua Mahkamah Agung, dikembalikan kepada Badan Pengawasan untuk dibuatkan Surat Pengantar Penjatuhan Hukuman Disiplin yang ditujukan kepada Dirjen terkait (tenaga teknis) dan Sekretaris Mahkamah Agung (tenaga non teknis). Bila tidak terbukti, oleh Ketua Kamar Pengawasan dikembalikan kepada Kepala Badan Pengawasan untuk diterbitkan Surat Pemulihan Nama Baik.

- Delegasi Pengadilan Tingkat Banding : 49 pengaduan
Surat pengaduan yang masuk Badan Pengawasan dilakukan penelaahan oleh Inspektur Wilayah I s/d IV dan Hakim Tinggi Pengawas, hasil dari penelaahan tersebut salah satunya adalah didelegasikan ke Pengadilan Tingkat Banding untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Tingkat Banding. Dan hasil pemeriksaan tersebut berupa LHP disampaikan kepada Badan Pengawasan untuk dilakukan proses penyelesaian selanjutnya.
- Delegasi Pengadilan Tingkat Pertama: 477 pengaduan
Surat pengaduan yang masuk Badan Pengawasan dilakukan telaah oleh Hakim Tinggi Pengawas, hasil dari penelaahan tersebut salah satunya adalah didelegasikan ke Pengadilan Tingkat Pertama untuk dilakukan Klarifikasi dan Konfirmasi serta hasilnya disampaikan kepada Badan Pengawasan untuk dilakukan proses penyelesaian selanjutnya.
- Delegasi Internal : 153 pengaduan
Merupakan salah satu bentuk tindak lanjut atas suatu pengaduan materi laporan Pengaduan yang tidak terkait dengan pelanggaran : Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita Pengadilan, Teknis yudisial dan Hukum Acara, Disiplin militer, Mal administrasi dan Pelayanan Publik tetapi berkaitan dengan substansi pemeriksaan Kasasi maupun PK atau permasalahan lainnya yang berkaitan dengan eselon 1 maupun eselon 2 pusat, karenanya Badan Pengawasan mendelegasikan kepada unit eselon 1 maupun unit eselon 2 pada Mahkamah Agung RI dalam bentuk Memorandum.
- Dijawab dengan surat (instansi) : 263 pengaduan
Surat pengaduan yang masuk Badan Pengawasan ada juga dari beberapa instansi seperti Komnas HAM, DPR, Ombudsman, Komisi Yudisial, dan yang lainnya. Surat-surat pengaduan dari instansi tersebut merupakan surat pengaduan dari pelapor yang diteruskan kepada Mahkamah Agung (Badan Pengawasan) jadi bukan berupa surat pengaduan yang asli dari instansi tersebut.
- Dijawab Surat : 631 pengaduan
Surat pengaduan yang masuk Badan Pengawasan tidak semuanya merupakan pengaduan sesuai dengan syarat yang ditentukan, tetapi terdapat pengaduan yang berisi substansi perkara yang masih berjalan pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding,

Kasasi dan PK. Selain itu pelaksanaan eksekusi perkara perdata maupun perkara pidana dan aparat peradilan diluar lingkungan Mahkamah Agung, terhadap surat pengaduan tersebut langsung dijawab kepada yang bersangkutan.

- Diarsipkan : 381 pengaduan

Kriteria pengaduan yang diarsipkan adalah surat yang tidak mencantumkan identitas terlapor, tidak disertai data dukung, dan tidak menunjuk substansi secara jelas serta identitas nama pengadilan dan nomor perkara yang dimaksud.

Sasaran 1

Indikator kinerja ke-2 : *Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi*

Tabel 3.4 *Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi*

No	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %	Target %	Realisasi %	Capaian %	Target %	Realisasi %	Capaian %
		2016			2017			2018		
2	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi.	100%	131%	131%	100%	134%	134%	100%	122%	122%

Tahun 2018 Tim Pemeriksa Badan Pengawasan menindaklanjuti sejumlah 181 LHP ditambah dengan hasil pemeriksaan dari pengadilan tingkat banding sejumlah 49 LHP menghasilkan 230 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Pencapaian target pengaduan yang selesai ditindaklanjuti melebihi dari target yang telah ditetapkan sejumlah 148 LHP yaitu sebesar 82 LHP, tetapi bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 228 LHP, realisasi pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 47 LHP dan dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 247 LHP mengalami penurunan sebesar 66 LHP.

Bila dibandingkan aparat peradilan yang terkena hukuman disiplin pada tahun 2018 sejumlah 163 orang dengan aparat peradilan yang terkena hukuman disiplin pada tahun 2017 sejumlah 156 orang terjadi kenaikan sejumlah 7 orang, bila dibanding dengan aparat peradilan yang terkena hukuman disiplin pada tahun 2016 sejumlah 150 orang terjadi kenaikan sejumlah 13 orang.

Jika dari jumlah LHP pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi penurunan, tetapi berbanding terbalik dengan jumlah aparat peradilan yang dikenakan hukuman disiplin pada tahun 2018.

Terjadi penurunan jumlah LHP yang ditindaklanjuti oleh Badan Pengawasan dikarenakan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa terdapat pengaduan yang tidak terbukti, dan terjadinya kenaikan jumlah aparat yang dijatuhi hukuman disiplin karena banyaknya aparat peradilan yang dilaporkan dalam surat pengaduan lebih dari seorang seperti majelis hakim, panitera pengganti, dan jurusita, merupakan satu kesatuan yang diadakan oleh pelapor dalam surat pengaduannya.

Dari 230 LHP yang diperiksa Badan Pengawasan sejumlah 89 LHP terbukti dan dikenakan hukuman disiplin, jumlah aparat peradilan yang dijatuhi hukuman disiplin pada tahun 2018 sejumlah 163 orang berasal dari 89 LHP. Aparat peradilan yang dikenakan sanksi setiap bulannya ditayangkan pada website Badan Pengawasan.

Tabel 3.5: Hukuman Disiplin Tahun 2018

NO	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1	Hakim	24	27	50	101
	Hakim Ad Hoc	1	-	1	2
2	Panitera	2	1	3	6
3	Sekretaris	-	-	4	4
4	Panitera Muda	1	1	3	5
5	Panitera Pengganti	8	3	8	19
6	Jurusita	1	-	3	4
7	Jurusita Pengganti	1	1	3	5
8	Pejabat Struktural	1	-	6	7
9	Staf	4	2	4	10
Jumlah		43	35	85	163



Sasaran 2 : Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel

Sasaran ini terdiri dari 12 indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6 Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	1. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	89 Satker	152 Satker	171%
	2. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	78 Satker	100 Satker	128%
	3. Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	8 Satker	11 Satker	137%
	4. Jumlah Satuan Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan	10 Satker	10 Satker	100%
	5. Jumlah Penguatan Hakim Pengawas Bidang	130 Orang	201 Orang	154%
	6. Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	27 orang	27 orang	100%
	7. Jumlah Penguatan APIP/ <i>Consulting</i>	130 orang	191 orang	147%
	8. Jumlah Pembinaan Sistem Pengaduan	145 orang	157 orang	108%
	9. Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang	130 orang	236 orang	181%

	terlaksana			
	10. Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	10 LHP	10 LHP	100%
	11. Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terlaksana	2 LHP	2 LHP	100%
	12. Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	74 LHE	74 LHE	100%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

Sasaran 2

Indikator kinerja ke-1 : Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler

Tabel 3.7 Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2016			2017			2018		
1	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	100 Satker	169 Satker	169%	114 Satker	125 Satker	110%	89 Satker	152 Satker	171%

Pada tahun 2018 Badan Pengawasan telah menetapkan target pengawasan reguler sejumlah 89 satker atau setara dengan 100% dan realisasi sebanyak 152 satker atau 171 % telah melampaui target yang ditentukan, hal ini mengalami peningkatan sebanyak 63 satker dikarenakan ada penambahan personil staf, hakim yustisial dan hakim tinggi pengawas.

Perbandingan pengawasan reguler tahun 2016 sejumlah 169 satker mengalami penurunan sejumlah 125 pada tahun 2017 kemudian tahun 2018 meningkat kembali menjadi 152 satker, hal ini karena adanya pengurangan anggaran tahun 2017, kemudian terjadi peningkatan tahun 2018 sejumlah 152 satker, hal ini terlaksana dengan dukungan anggaran yang memadai.

Sasaran 2

Indikator kinerja ke-2 : Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas

Tabel 3.8 Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2016			2017			2018		
2	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	100 Satker	101 Satker	101%	95 Satker	102 Satker	107 %	78 Satker	100 Satker	128%

Pada tahun 2018 Badan Pengawasan menetapkan target pemeriksaan kinerja dan integritas sejumlah 78 satker atau setara dengan 100% dan telah melampaui target yaitu telah terealisasi sejumlah 100 satker atau 128%, hal ini karena adanya penambahan personel Badan Pengawasan dan juga anggaran yang nilai alokasi biaya perjalanan yang besar dialokasikan kepada wilayah yang perjalanan anggaran yang relatif kecil.

Perbandingan pengadilan yang sudah dilakukan Pemeriksaan Kinerja/Integritas, yaitu tahun 2016 sejumlah 101 satker, tahun 2017 sejumlah 102 dibandingkan dengan tahun 2018 sejumlah 100 satker terdapat penurunan masing-masing 2 satker dan 1 satker, hal ini terjadi karena saat dilakukan pemeriksaan kinerja/integritas personel bawas melakukan pemeriksaan kasus atau kegiatan lain.

Sasaran 2

Indikator kinerja ke-3 : Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa

Tabel 3.9 Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2016			2017			2018		
3	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	12 Satker	12 Satker	100%	13 Satker	14 Satker	108%	8 Satker	11 Satker	137%

Pada tahun 2018 Badan Pengawasan menetapkan target pemeriksaan audit barang dan jasa sejumlah 8 satker atau setara dengan 100% dan telah terealisasi sejumlah 11 satker atau 137%, hal ini karena adanya penambahan auditor Badan Pengawasan

Perbandingan pengadilan yang telah dilakukan audit Barang dan Jasa tahun 2016 sejumlah 12 satker mengalami peningkatan sejumlah 14 satker tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami penurunan sejumlah 11 satker, hal ini terjadi karena adanya pengelola anggaran dalam satker sudah berjalan dengan baik.

Sasaran 2

Indikator kinerja ke-4 : Jumlah Pemeriksaan keuangan yang dilakukan

Tabel 3.10 Jumlah Pemeriksaan keuangan yang dilakukan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2016			2017			2018		
4	Jumlah Pemeriksaan keuangan yang dilakukan	20 Satker	31 Satker	155%	21 Satker	24 Satker	114%	10 Satker	10 Satker	100%

Kegiatan pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan penatausahaan keuangan dan memberikan keyakinan yang memadai bagi pengelola keuangan dilingkungan Mahkamah Agung dan pemangku kepentingan untuk melaksanakan anggaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan dan peruntukannya.

Tahun 2018 Badan Pengawasan melakukan kegiatan pemeriksaan keuangan sejumlah 10 satker atau setara dengan 100% dan sesuai target yang telah ditentukan 10 satker atau dengan capaian 100%, hal ini tercapai karena ada kerjasama diantara satker yang telah terjalin selama ini.

Perbandingan pelaksanaan pemeriksaan keuangan tahun 2017 sejumlah 21 target dan telah terealisasi sebanyak 24 satker atau 114 %, mengalami penurunan 14 satker, demikian pula dengan tahun 2016 tercatat realisasi 31 satker dari target yang ditentukan 20 satker terjadi penurunan 10 satker, dengan adanya penurunan tersebut berarti tingkat kepatuhan satker terhadap ketentuan dan aturan yang berlaku telah berhasil dilaksanakan.

Sasaran 2

Indikator kinerja ke-5 : Jumlah Penguatan Hakim Pengawas Bidang

Tabel 3.11 Jumlah Penguatan Hakim Pengawas Bidang

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2016			2017			2018		
5	Jumlah Penguatan Hakim Pengawas Bidang	140 orang	143 orang	102%	80 orang	80 orang	100%	130 orang	201 orang	154%

Untuk meningkatkan kapabilitas serta meningkatkan kemampuan Hakim Pengawas Bidang, Badan Pengawasan Mahkamah Agung secara terus menerus berupaya melakukan pengawasan secara optimal dan bersinergi dengan Hakim Pengawas Bidang.

Pada tahun 2018 Badan Pengawasan telah melakukan Penguatan Hakim Pengawas Bidang dengan target 130 orang atau setara dengan 100 % dan realisasi sebanyak 201 orang atau 154 % telah melebihi target dari yang telah direncanakan.

Perbandingan Hakim Pengawas Bidang tahun 2018 dengan tahun 2017 terjadi peningkatan baik dari segi target maupun realisasi, dari target terjadi peningkatan 50 orang atau 162% dan realisasi 121 orang atau 251 % terjadi peningkatan yang signifikan demikian pula dengan perbandingan tahun 2016 mengalami peningkatan 58 orang 141% namun dengan target sedikit menurun yaitu 10 orang 95%, hal ini terjadi karena penguatan untuk peningkatan kemampuan hakim masih sangat dibutuhkan dan didukung oleh anggaran yang tersedia.

Sasaran 2

Indikator kinerja ke-6 : Jumlah Assesment yang telah dilakukan

Tabel 3.12 Jumlah Assesment yang telah dilakukan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2016			2017					
6	Jumlah Assesment yang telah dilakukan	20 orang	20 orang	100%	1 kegiatan / 21 orang	1 kegiatan / 21 orang	100%	1 kegiatan / 27 orang	1 kegiatan / 27 orang	100%

Peningkatan dan penilaian kapasitas potensi diri berkaitan dengan aspek psikologi perlu dilakukan untuk mengukur kemampuan bagi Hakim Pengawas/Hakim Yustisial dan staf sesuai yang diharapkan.

Tahun 2018 Badan Pengawasan telah melaksanakan 1 kegiatan assesment atau setara dengan 100 % yang diikuti oleh 27 orang peserta, pelaksanaan assesment ini sesuai dengan target maupun realisasi yang telah ditentukan yaitu sebanyak 1 kegiatan dengan 27 orang peserta dengan capaian 100%.

Perbandingan assesment tahun 2018 dengan tahun 2017 terjadi peningkatan target maupun realisasi sebanyak 6 orang peserta atau 128 % demikian pula dengan tahun 2016 dari segi target maupun capaian mengalami peningkatan 7 orang peserta atau 135, hal ini terjadi karena adanya pengembangan karir dan permintaan personil yang dipersyaratkan.

Sasaran 2

Indikator kinerja ke-7 : Jumlah Penguatan APIP/ Consulting

Tabel 3.13 Jumlah Penguatan APIP / Consulting

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2016			2017			2018		
7	Jumlah Penguatan APIP / Consulting	160 orang	321 orang	201%	2 kegiatan / 340 orang	2 kegiatan / 340 orang	100%	130 orang	191 orang	147%

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015, Badan Pengawasan pada tahun 2018 telah melakukan kegiatan penguatan APIP (*Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*) sebanyak 2 kegiatan yang diikuti oleh 191 orang peserta dari target yang direncanakan sebanyak 130 orang atau 147 % mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan yaitu sejumlah 61 peserta.

Perbandingan penguatan APIP tahun 2018 dengan tahun 2017 mengalami penurunan dari target yaitu 210 orang peserta atau 38 % demikian pula dengan realisasi terjadi penurunan 149 orang peserta atau 56 %. Sedangkan untuk tahun 2016 juga mengalami penurunan dari target maupun realisasi masing-masing 30 orang peserta atau 81 % dan 130 orang peserta atau 60 %, hal ini dikarenakan adanya keinginan untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah agar lebih baik dan dapat meningkatkan kinerjanya.

Sasaran 2

Indikator kinerja ke-8 : Jumlah Pembinaan Sistem Pengaduan

Tabel 3.14 Jumlah Pembinaan Sistem Pengaduan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2016			2017			2018		
8	Jumlah Pembinaan Sistem Pengaduan	150 orang	336 orang	224%	2 kegiatan/ 184 orang	2 kegiatan/ 184 orang	100%	145 orang	157 orang	108%

Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Penguatan Sistem Pengawasan Aparatur Peradilan adalah untuk mengetahui kemampuan dan peningkatan kapasitas, kapabilitas dan integritas aparatur peradilan dalam menjalankan tugas dan melaksanakan kegiatan peradilan.

Tahun 2018 Badan Pengawasan telah melakukan 2 kegiatan pelaksanaan pembinaan sistem pengaduan dengan target 145 orang peserta atau setara dengan 100% dan realisasi sebanyak 157 orang peserta atau 108 %, melampaui target yang sesuai dengan perencanaan yaitu 12 orang peserta. Hal ini dikarenakan ada ketersediaan anggaran yang mencukupi dan adanya permintaan dari masing-masing satker yang ada.

Perbandingan kegiatan sosialisasi pengelolaan pengaduan tahun 2018 dengan tahun 2017 mengalami penurunan dari target maupun realisasi yaitu masing-masing 39 orang peserta atau 79 % dan realisasi 27 orang peserta atau 85 %, demikian pula tahun 2016 mengalami penurunan target 5 orang peserta dan realisasi penurunan 179 orang peserta, hal ini dikarenakan rata-rata peserta sudah ada yang pernah diundang untuk kegiatan pembinaan tersebut.

Sasaran 2

Indikator kinerja ke-9 : Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana

Tabel 3.15 Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2016			2017			2018		
9	Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	2 kegiatan / 150 orang	2 kegiatan / 262 orang	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	130 orang	236 orang	181%

Quality assurance merupakan kegiatan yang terencana dan sistematis suatu pekerjaan yang diimplementasikan dalam sistem penjaminan mutu sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam pelaksanaan pelayanan peradilan. Pada tahun 2018 Badan Pengawasan telah melakukan 2 kegiatan *Quality assurance* dengan target sebanyak 130 orang peserta atau setara dengan 100% dan melebihi target dari realisasi yang direncanakan 236 orang peserta atau 181 %. Hal ini dikarenakan ada ketersediaan anggaran yang mencukupi.

Perbandingan kegiatan *Quality Assurance* tahun 2018 dengan tahun 2016 mengalami penurunan dari target maupun realisasi masing-masing sebanyak 20 orang peserta dan 26 orang peserta atau 87 % dan terjadi penurunan sebanyak 26 dari target maupun realisasi.

Sasaran 2

Indikator kinerja ke-10 : Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK Yang Terlaksana

Tabel 3.16 Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang terlaksana

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2016			2017			2018		
10	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang terlaksana	40 LHP	40 LHP	100%	7 LHP	7 LHP	100%	10 LHP	10 LHP	100%

Tahun 2018 Badan Pengawasan telah melakukan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dengan target 10 LHP atau setara dengan 100% dan realisasi yang dilaksanakan sebanyak 10 LHP atau 100%, hal ini sesuai dengan program dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan. Perbandingan TLHP tahun 2018 dengan tahun 2017 mengalami peningkatan dari target maupun realisasi masing-masing 3 LHP atau 143 %, namun demikian bila dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami penurunan 30 LHP atau 25 %, hal ini terjadi dikarenakan ketersediaan anggaran yang mencukupi.

Sasaran 2

Indikator kinerja ke-11 : Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim Yang Terlaksana

Tabel 3.17 Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim Yang Terlaksana

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2016			2017			2018		
11	Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim Yang Terlaksana	4 kegiatan	3 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 LHP	2 LHP	100%

Tahun 2018 Badan Pengawasan merencanakan untuk melakukan Sidang Majelis Kehormatan Hakim yaitu 10 kegiatan MKH namun target dan realisasi hanya 2 kegiatan MKH atau 2 LHP, dengan penjatuhan hukuman kepada Hakim yang bersangkutan berupa hukuman disiplin masing-masing pemberhentian dengan hormat, bila diperbandingkan dengan tahun 2017 target dan realisasi tetap sama, namun tahun antara tahun 2018 dengan tahun 2016 mengalami penurunan dari target 4 kegiatan menjadi 2 kegiatan demikian pula dengan realisasi dari 3 kegiatan menjadi 2 kegiatan, hal ini tidak terlepas bahwa tidak semua penjatuhan sanksi dapat diajukan ke Sidang Majelis Kehormatan Hakim.

Sasaran 2

Indikator kinerja ke-12 : Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan

Tahun 2018 Evaluasi LKjIP dilakukan oleh Inspektur Wilayah masing-masing, baik pada Eselon I pusat maupun pada Pengadilan Tingkat Banding dengan data sebagai berikut :

Tabel 3.18 Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2016			2017			2018		
12	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	74 LHE, 3 kegiatan	74 LHE, 3 kegiatan	100%	74 LHE, 3 kegiatan	74 LHE, 2 kegiatan	100	74 LHE, 4 kegiatan	74 LHE, 4 kegiatan	100

Tahun 2018 Badan Pengawasan telah melaksanakan evaluasi LKjIP sebanyak 74 LHE atau terbagi dalam empat kegiatan yaitu wilayah I, II, III dan IV target dan realisasi telah tercapai 100%, perbandingan evaluasi LKjIP tahun 2018 dengan tahun 2017 target dan realisasi telah terpenuhi 100%, namun dalam hal kegiatan tahun 2017 terdapat 3 kegiatan dan

terrealisasi 2 kegiatan, demikian juga dengan tahun 2016 target dan realisasi telah terpenuhi 74 LHE atau 100%, hal ini dilakukan karena semua kegiatan evaluasi LKjIP telah diberikan kewenangannya kepada masing-masing wilayah terkait.

Tabel 3.19 Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan pada Inspektur Wilayah I

No	Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2017 (Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2018)					
	Nilai	Kategori	PT	PTA	PT TUN	DILMIL TI
1	>90 – 100	AA	-	-	-	-
2	>80 – 90	A	2	-	-	-
3	>70 – 80	BB	6	5	1	1
4	>60 – 70	B	1	1	-	-
5	>50 – 60	CC	-	3	-	-
6	>30 – 50	C	-	-	-	-
7	0 – 30	D	-	-	-	-
Jumlah			9	9	1	1

Hasil Evaluasi LKjIP wilayah I yaitu 2 Pengadilan Tinggi dengan kategori A yaitu Pengadilan Tinggi Bengkulu 83,92 dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru 83,05; mendapat nilai BB yaitu 6 Pengadilan Tinggi masing-masing Pengadilan Tinggi Banda Aceh 70,32, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 75,99, Pengadilan Tinggi Jambi 70,33, Pengadilan Tinggi Padang 74,91, Pengadilan Tinggi Palembang 71,89 dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang 77,30; kategori BB yaitu Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 78,69, Pengadilan Tinggi Agama Jambi 76,89, Pengadilan Tinggi Agama Padang 74,91, Pengadilan Tinggi Agama Medan 77,57, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 79,66, Pengadilan Tinggi TUN Medan 71,92 dan Dilmilti I Medan 72,21; kategori B yaitu Pengadilan Tinggi Medan 67,55 dan Mahkamah Syar'iyah Aceh 64,43 dan kategori CC yaitu Pengadilan Tinggi Agama Palembang 55,21, Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung 53,93 dan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung 59,88.

Tabel 3.20 Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan pada Inspektur Wilayah II

No	Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2017 (Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2018)							
	Nilai	Kategori	PT	PTA	PT TUN	DILMIL TI	DILMIL TAMA	ESELON I
1	>90 – 100	AA	-	-	-	-	-	-
2	>80 – 90	A	-	-	-	-	-	-
3	>70 – 80	BB	5	5	-	2	1	4
4	>60 – 70	B	-	-	1	-	-	2
5	>50 – 60	CC	2	1	1	-	-	1

6	>30 – 50	C	-	-	-	-	-	-
7	0 – 30	D	-	-	-	-	-	-
Jumlah			7	6	2	2	1	7

Hasil Evaluasi LKjIP wilayah II yaitu 4 Eselon I dengan kategori BB adalah Badan Pengawasan 75,79, Badan Urusan Administrasi 73,85, Kepaniteraan 75,25 dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 76,56, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 78,34, Pengadilan Tinggi Bandung 71,96, Pengadilan Tinggi Banten 72,89, Pengadilan Tinggi Denpasar 74,25 dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta 76,70, Dilmulti II Jakarta 72,91 dan Dilmulti III Surabaya 77,39; eselon I dengan kategori B yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 68,81 dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 65,53 , kategori CC yaitu Balitbang Diklat Kumdil 50,46, Pengadilan Tinggi Semarang 58,81, Pengadilan Tinggi Surabaya 58,60 dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang 56,87.

Tabel 3.21 Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan pada Inspektur Wilayah III

No	Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2017 (Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2018)					
	Nilai	Kategori	PT	PTA	PT TUN	DILMIL TI
1	>90 – 100	AA	-	-	-	-
2	>80 – 90	A	-	-	-	-
3	>70 – 80	BB	5	7	1	-
4	>60 – 70	B	2	2	-	-
5	>50 – 60	CC	2	-	-	-
6	>30 – 50	C	-	-	-	-
7	0 – 30	D	-	-	-	-
Jumlah			9	9	1	0

Hasil Evaluasi LKjIP wilayah III dengan kategori BB yaitu Pengadilan Tinggi Palangkaraya 70,50, Pengadilan Tinggi Banjarmasin 78,39, Pengadilan Tinggi Kendari 74,27, Pengadilan Tinggi Pontianak 71,82, Pengadilan Tinggi Gorontalo 71,12, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak 76,46, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo 73,45, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda 71,21, Pengadilan Tinggi Agama Manado 72,07, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 70,11, Pengadilan Tinggi Agama Palu 73,39, Pengadilan Tinggi Agama Makassar 74,64 dan Pengadilan Tinggi TUN Makassar 71,34. Kategori B yaitu Pengadilan Tinggi Samarinda 69,01 dan Pengadilan Tinggi Palu 67,59, Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya 69,02, Pengadilan Tinggi Agama Kendari 69,73. Kategori CC Pengadilan Tinggi Makassar 54,21 dan Pengadilan Tinggi Manado 57,95.

Tabel 3.22 Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan pada Inspektur Wilayah IV

No	Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2017 (Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2018)					
	Nilai	Kategori	PT	PTA	PT TUN	DILMIL TI
1	>90 – 100	AA	-	-	-	-
2	>80 – 90	A	-	1	-	-
3	>70 – 80	BB	4	2	-	-
4	>60 – 70	B	1	2	-	-
5	>50 – 60	CC	-	-	-	-
6	>30 – 50	C	-	-	-	-
7	0 – 30	D	-	-	-	-
Jumlah			5	5	0	0

Hasil Evaluasi LKjIP wilayah IV dengan kategori A yaitu Pengadilan Tinggi Agama Mataram 81,05. Dengan kategori BB yaitu Pengadilan Tinggi Maluku Utara 71,55, Pengadilan Tinggi Mataram 79,41, Pengadilan Tinggi Jayapura 70,76, Pengadilan Tinggi Ambon 71,80, Pengadilan Tinggi Agama Kupang 77,65 dan Pengadilan Agama Jayapura 75,48; Kategori B Pengadilan Tinggi Kupang 65,88, Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara 69,73 dan Pengadilan Tinggi Agama Ambon 69,94

C. Akuntabilitas Anggaran Kinerja

Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan, sejalan dengan hal tersebut Badan Pengawasan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23 Pengukuran Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	- Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	3.080 (surat pengaduan)	3.080 (surat pengaduan)	100%	Pengawasan pelaksanaan teknis, administrasi peradilan, administrasi umum, penanganan pengaduan (1077, 1078,5258,5259)	-	-	-
	- Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	148 (LHP)	181 (LHP)	122%		Rp 5.357.366.000	Rp 5.356.982.812	99,99%
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara	- Persentase pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	89 (satker)	152 (satker)	171%		Rp 5.489.944.000	Rp 5.489.891.025	99,99%

efektif, efisien dan akuntabel	- Persentase pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	8 (satker)	11 (satker)	137%	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (1079)	Rp 338.629.000	Rp 338.601.120	99,99%
	- Persentase pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja/integritas	78 (satker)	100 (satker)	128%		Rp 3.456.482.000	Rp 3.456.441.654	99,99%
	- Persentase Satuan Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan	10 (satker)	10 (satker)	100%		Rp 363.361.000	Rp 362.348.550	99,72%
	- Persentase LKJIP yang selesai dilakukan	74 (LHE)	74 (LHE)	100%		Rp 140.983.000	Rp 140.941.100	99,97%
	- Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	130 (orang)	236 (orang)	181%		Rp 839.131.000	Rp 839.123.772	99,99%
	- Persentase Penguatan Hakim Pengawas Bidang	130 (orang)	201 (orang)	154%		Rp 783.193.000	Rp 783.192.202	99,99%
	- Persentase Pegawai yang mengikuti assessment	27 (orang)	27 (orang)	100%		Rp 157.700.000	Rp 157.683.123	99,98%
	- Persentase Penguatan APIP / Consulting	130 (orang)	191 (orang)	147%		Rp 650.565.000	Rp 650.536.000	99,99%
	- Persentase Pembinaan Sistem Pengaduan	145 (orang)	157 (orang)	108%		Rp 747.660.000	Rp 747.624.953	99,99%
	- Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	10 (LHP)	10 (LHP)	100%		Rp 242.403.000	Rp 242.302.700	99,95%
	- Persentase Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	2 (LHP)	2 (LHP)	100%		Rp 25.940.000	Rp 25.600.000	98,68%

Tahun 2018 Badan Pengawasan untuk melaksanakan kegiatan pencapaian kinerja sebesar Rp18.593.357.000,- dengan realisasi penggunaan tersebut sebesar Rp18.591.269.011,- atau dengan persentase sebesar 99,98% dan sisa anggaran sebesar Rp2.087.989,- atau 0,02%. Dengan demikian Badan Pengawasan telah melaksanakan pencapaian sasaran atau target kebijakan yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan hasil capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan serta sebagai tolok ukur dalam menjalankan tugas pokok maupun fungsi Badan Pengawasan, secara umum capaian kinerja Badan Pengawasan tahun 2018 telah sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan yaitu berupa target-target yang akan dicapai beserta anggarannya.

Penggunaan anggaran yang mendukung pelaksanaan mencapai target-target tersebut, dalam penggunaannya dapat dipertanggung jawabkan/akuntabel karena adanya kesesuaian antara target yang direncanakan dengan realisasi, dimana serapan anggarannya mencapai 99,98%, dengan demikian kinerja Badan Pengawasan tahun 2018 dapat disimpulkan baik.

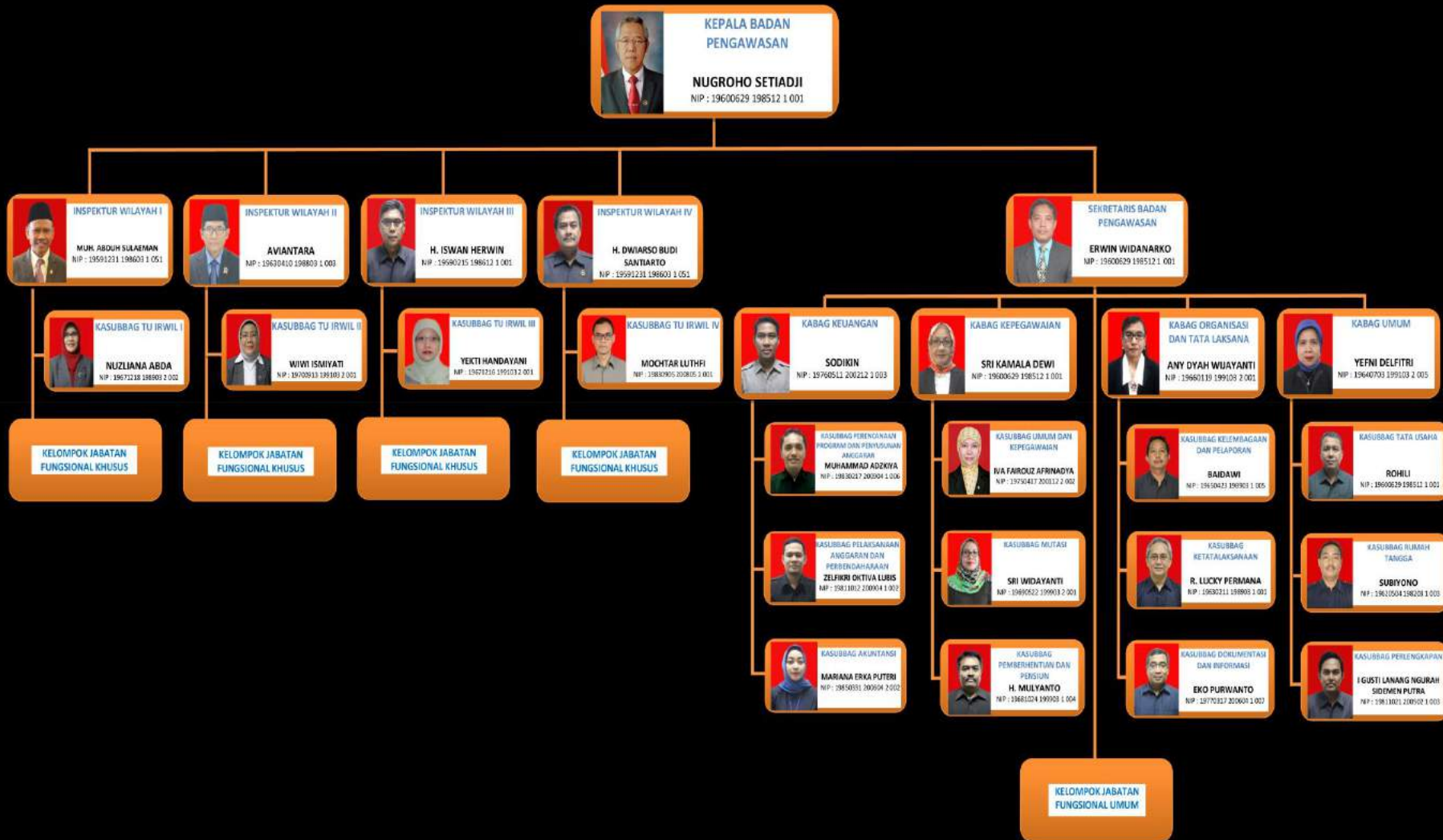
B. Saran

Agar kinerja yang telah dicapai dapat tetap dipertahankan, maka pengumpulan data harus lebih diandalkan dan dilakukan secara berkala seperti bulanan, triwulan maupun semester.

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG R.I



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PENGAWASAN**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR :50A / BP/SK/VIII/2016
TENTANG
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI**

KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mengukur tingkat capaian akuntabilitas kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai indikasi tingkat keberhasilan sesuai dengan Renstra Badan Pengawasan 2015 – 2019 dan kebijakan Mahkamah Agung, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang merupakan ukuran atau indikator sebagai informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
- b. Bahwa untuk mengukur keberhasilan terwujudnya Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan perlu dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lajur 3 dan penjelasan pada lajur 4 dalam lampiran surat keputusan ini, adalah merupakan acuan kinerja dilingkungan Badan Pengawasan.

KEDUA : Bahwa dalam menyusun perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/09/MPAN/5/2007, berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama.

KETIGA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/20/MPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid yang dapat dipergunakan untuk pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
 NOMOR : 50A/BP/SK/VIII/2016
 TANGGAL : 9 Agustus 2016

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dibagi Jumlah pengaduan yang diterima dikali 100%.	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV
		Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi dibagi Jumlah pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dikali 100%.	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Laporan Triwulan website dari Ortala

As
 KEPALA BADAN PENGAWASAN
 MAHKAMAH AGUNG RI

 NUGROHO SETIADJI

MATRIK RENSTRA 2015 – 2019

REVIEW BASELINE 2014
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Kode	Program/Kegiatan/Output/Komponen	Sasaran	Indikator	VOLUME					APBN 2014			PRAKIRAAN MAJU			
				2014	2015	2016	2017	Satuan	Operasional	Non Ops	Jumlah	2015	2016	2017	2018
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah								4.581,2	24.268,8	28.850,0	30.072,6	38.123,9	41.366,4	42.904,6
1077	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah 1	Penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien di Inspektur Wilayah 1	Jumlah penanganan pengawasan teknis, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya Inspektur Wilayah 1	64	101	119	123	Laporan	0,0	14.275,1	14.275,1	3.837,5	4.353,9	4.789,4	5.268,2
	Pemeriksaan Kasus	Penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien	Jumlah penanganan pengawasan teknis, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.	44	44	46	47	Laporan	0,0	1.526,8	1.526,8	1.539,2	1.744,4	1.921,0	2.113,1
	Pemeriksaan Reguler	Terselenggaranya manajemen administrasi peradilan dan administrasi umum	Jumlah penanganan pengawasan teknis, administrasi peradilan, administrasi umum, serta penangan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.	20	24	31	32	Laporan	0,0	1.177,2	1.177,2	1.026,7	1.219,6	1.451,6	1.596,7
	Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya audit pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah audit pengadaan barang dan jasa wilayah 1		3	6	7	Laporan				128,5	145,6	160,2	176,2
	Pemeriksaan Kinerja dan Integritas	Meningkatkan kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan	29	30	36	37	Laporan		1.038,5	1.038,5	1.143,1	1.142,3	1.256,6	1.382,2
1078	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah 2	Penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien di Inspektur Wilayah 2	Jumlah penanganan pengawasan teknis, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya Inspektur Wilayah 2	116	124	143	146	Laporan				3.242,5	4.426,7	4.869,4	5.356,2
	Pemeriksaan Kasus	Penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien	Jumlah penanganan pengawasan teknis, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.	49	68	70	70	Laporan		1.439,0	1.439,0	1.795,7	2.319,1	2.551,0	2.806,1
	Pemeriksaan Reguler	Terselenggaranya manajemen administrasi peradilan dan administrasi umum	Jumlah penanganan pengawasan teknis, administrasi peradilan, administrasi umum, serta penangan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.	33	20	26	27	Laporan		1.098,4	1.098,4	341,7	936,0	1.029,6	1.132,5
	Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya audit pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah audit pengadaan barang dan jasa wilayah 2		1	9	9	Laporan				26,2	145,6	160,2	176,2
	Pemeriksaan Kinerja dan Integritas	Meningkatkan kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan	34	35	39	40	Laporan		932,7	932,7	1.078,9	1.026,0	1.128,6	1.241,4

5258	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah 3	Penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien di Inspektur Wilayah 3	Jumlah penanganan pengawasan teknis, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya Inspektur Wilayah 3	89	93	112	115	Laporan			4.085,4	4.336,1	4.769,8	3.157,7
	Pemeriksaan Kasus	Penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien	Jumlah penanganan pengawasan teknis, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.	38	42	40	40	Laporan	1.527,1	1.527,1	1.695,6	1.801,3	1.981,4	2.179,5
	Pemeriksaan Reguler	Terselenggaranya manajemen administrasi peradilan dan administrasi umum	Jumlah penanganan pengawasan teknis, administrasi peradilan, administrasi umum, serta penangan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.	26	20	34	35	Laporan	1.217,1	1.217,1	994,7	1.726,4	1.899,1	2089,0
	Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya audit pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah audit pengadaan barang dan jasa wilayah 3		4	6	7	Laporan			191,7	145,6	160,2	176,2
	Pemeriksaan Kinerja dan Integritas	Meningkatkan kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan	25	27	32	33	Laporan	602,6	602,6	1.197,4	662,8	729,1	802,0
5259	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah 4	Penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien di Inspektur Wilayah 4	Jumlah penanganan pengawasan teknis, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya Inspektur Wilayah 4	42	46	55	58	Laporan			2.617,2	3.087,2	3.395,9	3.735,4
	Pemeriksaan Kasus	Penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien	Jumlah penanganan pengawasan teknis, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.	18	16	20	20	Laporan	951,7	951,7	810,3	1.179,7	1.297,7	1.427,4
	Pemeriksaan Reguler	Terselenggaranya manajemen administrasi peradilan dan administrasi umum	Jumlah penanganan pengawasan teknis, administrasi peradilan, administrasi umum, serta penangan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.	12	19	13	14	Laporan	725,7	725,7	1.183,7	608,2	889,0	977,9
	Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya audit pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah audit pengadaan barang dan jasa wilayah 4		3	4	5	Laporan			206,0	145,6	160,2	176,2
	Pemeriksaan Kinerja dan Integritas	Meningkatkan kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan	12	8	18	19	Laporan	867,0	867,0	417,2	953,7	1.049,0	1.153,9

SK TIM PENYUSUNAN LKjIP 2018



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PENGAWASAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : **56A/BP/SK/XX/2018**

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2018**

KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa guna penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2018, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan LKJIP Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2018;

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan Laporan tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Ketatalaksanaan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2018**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Semua biaya yang berkaitan dengan Penyusunan LKjIP Badan Pengawasan Tahun 2018 dibebankan pada DIPA Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2018.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 8 Oktober 2018

KEPALA BADAN PENGAWASAN

MAHKAMAH AGUNG RI


NUGROHO SEFIADI



Lampiran: Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Nomor : **56A/BP/SK/X/2018**

Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKJIP)
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2018

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Nugroho Setiadi, SH.	3	4
2.	Drs. Erwin Widanarko, SH., S.AP., M.Pd	Kepala Badan Pengawasan	Penanggung Jawab
3.	Dra. Any Dyah Wijayanti	Sekretaris Badan Pengawasan	Ketua
4.	R. Lucky Permana, S.H., M.H.	Kabag Organisasi dan Tata laksana	Anggota
5.	Baidawi, SE, MM	Kasubbag Ketatalaksanaan	Anggota
6.	Elko Purwanto, ST, MH	Kasubbag Kelengkapan dan Pelaporan	Anggota
7.	Fery T. Ferdiansyah, SE, Ak	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi	Anggota
8.	Imam Purnomo, SE, Ak	Auditor	Anggota
9.	Muhammad Anis, SE, Ak	Auditor	Anggota
10.	Rama Rahim, SE, MM, MBA	Auditor	Anggota
11.	Hendra Bastiy, SE	Auditor	Anggota
12.	Muhammad Huzaifah, Skom	Pranata Komputer	Anggota
13.	Dewi Putri Noviardari, S.Kom.	Staf Bagian Ortala	Anggota

Jakarta, 15 Oktober 2018
KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI

NUGROHO SETIADI
KEPALA BADAN PENGAWASAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017

**RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017
(RKT)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	1077, 1078,5258, 5259 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah	001 Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-
	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (Kasus)	100%			-	170	Rp6.673.221.000
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	1. Jumlah pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	114 LHP			001 Jumlah LHP Pengawasan di lingkungan Inspektorat wil I, II, III, IV	97	Rp5.306.857.000
	2. Jumlah pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	95 LHP				95	Rp3.319.683.000
	3. Jumlah pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	13 LHP				12	Rp 409.598.000
	4. Jumlah Satuan Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan	21 LHP				21	Rp 524.227.000
	5. Jumlah Quality Assurance	2 kegiatan					1079 Dukungan

	pengelolaan keuangan yang terlaksana			Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	yang mendapat peningkatan kompetensi sistem pengawasan		
	6. Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	3 kegiatan (74 LKjIP)		Badan Pengawasan Mahkamah Agung		3	Rp 34.998.000
	7. Jumlah Pembinaan Hakim Pengawas Bidang	1 kegiatan				1	Rp 279.015.000
	8. Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	1 kegiatan				20	Rp 138.296.000
	9. Jumlah Penguatan APIP / Consulting	2 kegiatan				2	Rp 733.253.000
	10. Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan	2 kegiatan				2	Rp 985.915.000
	11. Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	7 LHP			002 Dokumen tata kelola	7	Rp 191.000.000
	12. Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	2 kegiatan			004 Pelaksanaan MKH	4	Rp 43.370.000

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018

**RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018
(RKT)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	1077, 1078,5258, 5259 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah	001 Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-
	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (Kasus)	100% (148 LHP)			-	170	Rp5.357.366.000
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	1. Jumlah pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	89 Satker			001 Jumlah LHP Pengawasan di lingkungan Inspektorat wil I, II, III, IV	97	Rp5.489.944.000
	2. Jumlah pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	78 Satker				95	Rp3.456.482.000
	3. Jumlah pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	8 Satker				12	Rp 338.629.000
	4. Jumlah Satuan Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan	10 Satker				21	Rp 363.361.000
	5. Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	74 LHE				3	Rp 140.983.000
	6. Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	130 orang				2	Rp 839.131.000
			1079 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	001 Tenaga pengawas yang mendapat peningkatan kompetensi sistem			

	7. Jumlah Penguatan Hakim Pengawas Bidang	130 orang		Badan Pengawasan Mahkamah Agung	pengawasan	1	Rp 783.193.000
	8. Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	27 orang				20	Rp 157.700.000
	9. Jumlah Penguatan APIP / Consulting	130 orang				2	Rp 650.565.000
	10. Jumlah Pembinaan Sistem Pengaduan	145 orang				2	Rp 747.660.000
	11. Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	10 LHP			002 Dokumen tata kelola	7	Rp 242.403.000
	12. Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	2 LHP			004 Pelaksanaan MKH	4	Rp 25.940.000

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019

**RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019
(RKT)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	1077, 1078,5258, 5259 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah	001 Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-
	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (Kasus)	100% (175 LHP)			-	170	Rp6.736.270.000
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	1. Jumlah pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	60 LHP			001 Jumlah LHP Pengawasan di lingkungan Inspektorat wil I, II, III, IV	97	Rp2.521.272.000
	2. Jumlah pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	83 LHP				95	Rp3.486.872.000
	3. Jumlah pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	4 LHP				12	Rp 164.636.000
	4. Jumlah Satuan Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan	10 LHP				21	Rp 371.760.000
	5. Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	74 LHE				3	Rp 247.924.000
					001 Tenaga pengawas yang mendapat peningkatan		

	6. Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	1 Kegiatan		1079 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	kompentesi sistem pengawasan	2	Rp 538.648.000
	7. Jumlah Penguatan Hakim Pengawas Bidang	2 Kegiatan				1	Rp 766.402.000
	8. Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	25 Orang				20	Rp 170.000.000
	9. Jumlah Penguatan APIP / Consulting	1 Kegiatan				2	Rp 720.963.000
	10. Jumlah Pembinaan Sistem Pengaduan	2 Kegiatan				2	Rp 777.956.000
	11. Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	10 LHP			002 Dokumen tata kelola	7	Rp 100.000.000
	12. Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	10 LHP			004 Pelaksanaan MKH	4	Rp 100.000.000

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
KEPALA BADAN PENGAWASAN
TAHUN 2018 DAN 2019**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nugroho Setiadji, S.H.
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Selanjutnya disebut **pihak pertama**
Nama : Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum
Jabatan : Sekretaris Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2018, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Sekretaris Mahkamah Agung RI
Pihak Kedua

Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum



PERJANJIAN KINERJA (PK) 2018 KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (Kasus)	100%		Rp5.357.366.000
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	1. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	89 Satker		Rp5.489.944.000
	2. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	78 Satker		Rp3.456.482.000
	3. Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	8 Satker		Rp 338.629.000
	4. Jumlah Satuan Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan	10 Satker		Rp 363.361.000
	5. Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	74 LHE		Rp 140.983.000
	6. Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	130 Orang		Rp 839.131.000
	7. Jumlah Penguatan Hakim Pengawas Bidang	130 Orang	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Rp 783.193.000
	8. Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	27 Orang		Rp 157.700.000
	9. Jumlah Penguatan APIP / Consulting	130 Orang		Rp 650.565.000
	10. Jumlah Pembinaan Sistem Pengaduan	145 Orang		Rp 747.660.000
	11. Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	10 LHP		Rp 242.403.000
	12. Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	2 LHP		Rp 25.940.000

Jumlah Anggaran : **Rp18.593.357.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan serta Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nugroho Setiadji, S.H.
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H.,M.Hum
Jabatan : Sekretaris Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2019, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Januari 2019

Sekretaris Mahkamah Agung RI
Pihak Kedua

Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H.,M.Hum



Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Pertama

Nugroho Setiadji, S.H.

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2019 KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (Kasus)	100%		Rp6.736.270.000
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	1. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	60 LHP		Rp2.521.272.000
	2. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	83 LHP		Rp3.486.872.000
	3. Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	4 LHP		Rp 164.636.000
	4. Jumlah Satuan Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan	10 LHP		Rp 371.760.000
	5. Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	74 LHE		Rp 247.924.000
	6. Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	1 Kegiatan		Rp 538.648.000
	7. Jumlah Penguatan Hakim Pengawas Bidang	2 Kegiatan		Rp 766.402.000
	8. Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	25 Orang		Rp 170.000.000
	9. Jumlah Penguatan APIP / Consulting	1 Kegiatan		Rp 720.963.000
	10. Jumlah Pembinaan Sistem Pengaduan	2 Kegiatan		Rp 777.956.000
11. Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	10 LHP	Rp 100.000.000	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	
12. Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	10 LHP	Rp 100.000.000		

Jumlah Anggaran : **Rp16.702.703.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan serta Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIS BADAN PENGAWASAN
TAHUN 2018 DAN 2019**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erwin Widanarko
Jabatan : Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**
Nama : Nugroho Setladji
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2018, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Sekretaris Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Pertama


Erwin Widanarko

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Kedua


Nugroho Setladji

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2018 SEKRETARIS BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	130 Orang	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Rp 839.131.000
	Jumlah Penguatan Hakim Pengawas Bidang	130 Orang		Rp 783.193.000
	Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	27 Orang		Rp 157.700.000
	Jumlah Penguatan APIP / Consulting	130 Orang		Rp 650.565.000
	Jumlah Pembinaan Sistem Pengaduan	145 Orang		Rp 747.660.000
	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	10 LHP		Rp 242.403.000
	Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	2 LHP		Rp 25.940.000

Jumlah Anggaran : **Rp 3.446.592.000,-**

Program : Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erwin Widanarko
Jabatan : Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**
Nama : Nugroho Setiadji
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**
Pihak pertama pada tahun 2019, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Januari 2019

Sekretaris Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Pertama


Erwin Widanarko

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Kedua


Nugroho Setiadji



PERJANJIAN KINERJA (PK) 2019 SEKRETARIS BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	1 Kegiatan	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Rp538.648.000
	Jumlah Penguatan Hakim Pengawas Bidang	2 Kegiatan		Rp766.402.000
	Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	25 Orang		Rp170.000.000
	Jumlah Penguatan APIP / Consulting	1 Kegiatan		Rp720.963.000
	Jumlah Pembinaan Sistem Pengaduan	2 Kegiatan		Rp777.956.000
	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	10 LHP		Rp100.000.000
	Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	10 LHP		Rp100.000.000

Jumlah Anggaran : **Rp.3.173.969.000,-**

Program : Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

P

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
INSPEKTUR WILAYAH I
TAHUN 2018 DAN 2019**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H
Jabatan : Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Nugroho Setiadji, S.H.
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2018, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Kedua

Nugroho Setiadji, S.H.

Inspektur Wilayah I
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Pihak Pertama

Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2018 INSPEKTUR WILAYAH I BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (kasus)	100%		Rp1.461.066.000
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	29 Satker		Rp1.540.629.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	25 Satker		Rp 977.117.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	2 Satker		Rp 79.437.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	4 Satker		Rp 143.925.000
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	20 LHE	Rp 35.004.000	

Jumlah Anggaran : **Rp4.237.178.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H
Jabatan : Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Nugroho Setiadji, S.H.
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2019, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Januari 2019

Inspektur Wilayah I
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Pihak Pertama

Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Kedua



Nugroho Setiadji, S.H.

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2019 INSPEKTUR WILAYAH I BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (kasus)	100%		Rp1.605.927.000
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	15 LHP		Rp 676.454.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	25 LHP		Rp1.068.105.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	1 LHP		Rp 38.364.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	4 LHP		Rp 139.540.000
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	20 LHE	Rp 32.620.000	

Jumlah Anggaran : **Rp3.561.010.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
INSPEKTUR WILAYAH II
TAHUN 2018 DAN 2019**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aviantara, S.H., M.Hum
Jabatan : Plt. Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Nugroho Setiadji, S.H.
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2018, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Plt. Inspektur Wilayah II
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Pihak Pertama

Aviantara, S.H., M.Hum

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Kedua

Nugroho Setiadji, S.H.



PERJANJIAN KINERJA (PK) 2018 INSPEKTUR WILAYAH II BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (kasus)	100%		Rp1.485.638.000
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	25 Satker		Rp1.753.477.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	25 Satker		Rp 877.177.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa / audit kepegawaian	2 Satker		Rp 40.013.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	2 Satker		Rp 66.368.000
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	25 LKjIP	Rp 31.100.000	

Jumlah Anggaran : Rp4.253.773.000,-

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aviantara, S.H., M.Hum
Jabatan : Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**
Nama : Nugroho Setiadji, S.H.
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**
Pihak pertama pada tahun 2019, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Januari 2019

Inspektur Wilayah II
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Pihak Pertama


Aviantara, S.H., M.Hum

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Kedua


Nugroho Setiadji, S.H.



PERJANJIAN KINERJA (PK) 2019 INSPEKTUR WILAYAH II BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (kasus)	100%		Rp2.184.833.000
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	20 LHP		Rp 483.694.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	25 LHP		Rp 814.638.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa / audit kepegawaian	1 LHP		Rp 35.300.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	2 LHP		Rp 76.448.000
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	25 LHE		Rp 142.464.000

Jumlah Anggaran : Rp3.737.377.000,-

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
INSPEKTUR WILAYAH III
TAHUN 2018 DAN 2019**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Iswan Herwin, S.H., M.H

Jabatan : Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Nugroho Setiadji, S.H.

Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2018, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Inspektur Wilayah III
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Pihak Pertama

H. Iswan Herwin, S.H., M.H

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Kedua

Nugroho Setiadji, S.H.

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2018 INSPEKTUR WILAYAH III BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (kasus)	100%		Rp1.386.742.000
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	20 Satker		Rp1.207.058.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	20 Satker		Rp 937.369.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	2 Satker		Rp 103.754.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	2 Satker		Rp 73.599.000
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	19 LHE	Rp 40.274.000	

Jumlah Anggaran : **Rp3.748.796.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Iswan Herwin, S.H., M.H
Jabatan : Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Nugroho Setiadji, S.H.
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2019, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Januari 2019

Inspektur Wilayah III
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Pihak Pertama

H. Iswan Herwin, S.H., M.H



PERJANJIAN KINERJA (PK) 2019 INSPEKTUR WILAYAH III BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (kasus)	100%		Rp1.520.244.000
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	15 LHP		Rp 739.438.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	20 LHP		Rp 880.413.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	1 LHP		Rp 38.608.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	2 LHP		Rp 79.504.000
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	19 LHE	Rp 31.968.000	

Jumlah Anggaran : **Rp3.290.175.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
INSPEKTUR WILAYAH IV
TAHUN 2018 DAN 2019**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aviantara, S.H., M.Hum
Jabatan : Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Nugroho Setiadji, S.H.
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2018, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Inspektur Wilayah IV
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Pihak Pertama

Aviantara, S.H., M.Hum

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Kedua



Nugroho Setiadji, S.H.

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2018 INSPEKTUR WILAYAH IV BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Meningkatnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (kasus)	100%		Rp1.023.920.000
Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	15 Satker		Rp 988.780.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	8 Satker		Rp 664.819.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	2 Satker		Rp 115.425.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	2 Satker		Rp 79.469.000
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	10 LHE	Rp 34.605.000	

Jumlah Anggaran : **Rp2.907.018.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum
Jabatan : Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Nugroho Setiadji, S.H.
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2019, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Januari 2019

Inspektur Wilayah IV
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Pihak Pertama

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Kedua



Nugroho Setiadji, S.H.



PERJANJIAN KINERJA (PK) 2019 INSPEKTUR WILAYAH IV BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Meningkatnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (kasus)	100%		Rp1.425.266.000
Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	10 LHP		Rp 621.686.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	13 LHP		Rp 723.716.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	1 LHP		Rp 52.364.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	2 LHP		Rp 76.268.000
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	10 LHE		Rp 40.872.000

Jumlah Anggaran : **Rp2.940.172.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan